



LKjIP 2023

KECAMATAN WALANTAKA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Kecamatan Walantaka Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LKjIP ini juga didasarkan para Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Walantaka tahun 2023 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang isinya berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Kota Serang.

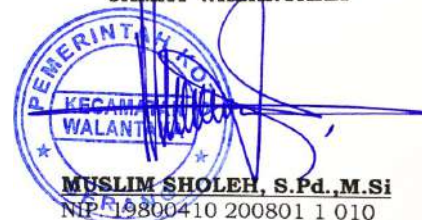
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Walantaka tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Government. Dan merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023.

Dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan tolak ukur target pencapaian kinerja di Kecamatan Walantaka serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang urusan demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Serang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga Dokumen LKjIP Kecamatan Walantaka tahun 2023 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 27 Januari 2024

CAMAT WALANTAKA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 LANDASAN HUKUM.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
1.5 GAMBARAN PELAYANAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	7
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH.....	7
B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	18
C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN DAERAH.....	23
BAB II.....	25
PERENCANAAN KINERJA.....	25
2.1 RENCANA PEBANGUNAN JANGKA MENENGAH.....	25
2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN.....	30
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	33
2.4 Perjanjian Kinerja.....	37
2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja.....	38
BAB III.....	113
AKUNTABILITAS KINERJA.....	113
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	113
5.1.01 REALISASI ANGGARAN.....	146
5.1.02 Daftar Penghargaan.....	150
BAB IV.....	152
TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI.....	152
EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA.....	152
BAB V.....	158
PENUTUP.....	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	11
Data PNS Kecamatan Walantaka Berdasarkan Jabatan Tahun 2023.....	11
Tabel 1.2.....	11
Data PNS Kecamatan Walantaka Berdasarkan Golongan Tahun 2023.....	11
Tabel. I.3.....	11
Daftar Susunan Kepegawaian Kecamatan Walantaka Tahun 2023.....	11
Tabel 1.4.....	17
Data PNS Kecamatan Walantaka Berdasarkan Pendidikan.....	17
Tahun 2023.....	17
Tabel 1.5.....	19
Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Walantaka.....	19
Tabel 1.6.....	20
Jumlah RT, RW dan Kampung/ Lingkungan.....	20
Per Kelurahan.....	20
Tabel 1.7.....	22
Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja.....	22
Tabel 2.1.....	29
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kecamatan Walantaka.....	29
Tabel 2.2.....	31
Program Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2023.....	31
Tabel Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis.....	34
TABEL 2.4.....	38
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN WALANTAKA.....	38
Tabel 2.5.....	39
Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan Walantaka Tahun 2023.....	39

TABEL 3.1.....	114
PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023.....	114
Tabel 3.2.....	118
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	118
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2023.....	118
Tabel 3.3.....	124
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	124
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2018 s.d 2023.....	124
Tabel 3.4.....	126
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN WALANTAKA.....	126
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.....	126
TABEL 3.5.....	133
PENCAPAIAN TINGKAT EFESIENSI REALISASI ANGGARAN DENGAN KINERJA TAHUN 2023.....	133
TABEL 3.6.....	135
Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian.....	135
Indikator Kinerja Kecamatan Walantaka tahun 2023.....	135
Tabel 3.7.....	140
Hasil Laporan EPDESKEKEL tahun 2022.....	140
Tabel 3.8.....	143
Lokus Sarpras Kelurahan.....	143
TABEL 3.9.....	146
REALISASI PROGRAM DAN SUB KEGIATAN.....	146
KECATAMA WALANTAKA TAHUN 2023.....	146
TABEL 3.10.....	148
PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN.....	148
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2023.....	148

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.....	10
Struktur Organisasi Kecamatan Walantaka.....	10
Gambar 1.2.....	18
Peta Administrasi Kecamatan Walantaka.....	18
Grafik 2.1.....	32
Tabel Program Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2023.....	32
Grafik 3.1.....	118
Tabel Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka Tahun 2023.....	118
Grafik 3.2.....	120
Postur Pelayanan Publik di PATEN Walantaka.....	120
Grafik 3.3.....	124
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	124
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2023.....	124
GRAFIK 3.4.....	125
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	125
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2018 s.d 2022.....	125
GRAFIK 3.5.....	127
INDEKS KEPUASAN PELAYANAN.....	127
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2023.....	127
GRAFIK 3.6.....	128
HASIL EVALUASI LKjIP KECAMATAN WALANTAKA.....	128
TAHUN 2023.....	128
GRAFIK 3.7.....	129
CAPAIAN KINERJA IKM PELAYANAN.....	129

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAHUN 2023.....	129
GRAFIK 3.8.....	135
PENCAPAIAN TINGKAT EFESIENSI REALISASI ANGGARAN.....	135
DENGAN KINERJA TAHUN 2023.....	135
Grafik 3.9.....	138
Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Walantaka tahun 2023.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya-guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Pera-turan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pera-turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Walantaka selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Serang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Walantaka Kota Serang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Walantaka Kota

Serang Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah/Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja memuat ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan walantaka Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 yang menyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden me-lalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan bertitik tolak dari Perubahan Kedua RENSTRA Kecamatan walantaka Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan walantaka Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Walantaka Tahun 2023, serta hasil reuiu sasaran dan indikator RENSTRA Kecamatan walantaka, maka penyusunan LKjIP Tahun 2023 menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan kecama-tan yang demokratis, transparan, akuntabel, berdayaguna dan bertanggungja-wab.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan walantaka Tahun 2023 antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Walantaka selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi yang tertuang dalam Perubahan Kedua RENSTRA Kecamatan walantaka Tahun 2019-2023;

3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Kecamatan walantaka untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Walantaka.

1.3 LANDASAN HUKUM

LKjIP Kecamatan Walantaka sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LKjIP Kecamatan Walantaka Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroksasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroksasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 03 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023;.
12. Peraturan Daerah Serang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 27 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang;
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 90 tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 50 tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKJiP Kecamatan Walantaka Kota Serang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Akuntabilitas Kinerja, SAKIP dan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan implementasinya dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan birokrasi dan alasan yang melatarbelakangi disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.3 Landasan Hukum

Memuat penjelasan peraturan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi, kewenangan organisasi, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

1.5 Gambaran Pelayanan Umum Pemerintah Daerah Memuat informasi tentang:

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan organisasi, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana organisasi (proses, prosedur, mekanisme).

b. Sumber Daya Organisasi

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang isu strategis yang menjadi akar permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan yang menjadi tugas dan fungsi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:

- 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- 2.2 Rencana Kerja Tahunan;
- 2.3 Indikator Kinerja Utama berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis;
- 2.4 Perjanjian Kinerja;
- 2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang :

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini;
 - b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Berkenaan Dengan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Yang telah Dicapai Agar Dapat Dilihat Fluktasi Pertumbuhan Kenaikan Atau Penurunan Capaian Kinerja Tersebut;
 - c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
 - d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional;

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

A. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Tahun sebelumnya

Pada bab ini diuraikan langkah dan upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi penilaian laporan akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) IKU dan Perjanjian Kinerja;
- 2) Laporan Pengukuran Kinerja setiap triwulan selama tahun 2023;
- 3) Rencana Aksi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023;
- 4) Laporan Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya;
- 5) Lain-lain yang dianggap perlu

1.5 GAMBARAN PELAYANAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Walantaka merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Serang dan merupakan salah satu Kecamatan dari enam Kecamatan yang ada di Kota Serang, terletak disebelah timur Kota Serang. Kecamatan Walantaka merupakan wilayah pembangunan bagian timur dari Kota Serang, wilayah pembangunan wilayah timur ini diarahkan dengan fungsi utama adalah Perdagangan, Jasa, Pemerintahan, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Umum.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Walantaka Kota Serang dalam melaksanakan tugas pemerintahan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Sedangkan Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan diatur sebagaimana dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 27 tahun 2021.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Susunan organisasi Kecamatan Walantaka sebagaimana berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemerintahan Umum;
- f. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
- g. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik; dan
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Kecamatan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan visi dan misi

Walikota sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya Kecamatan Walantaka mempunyai fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Kecamatan dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan.

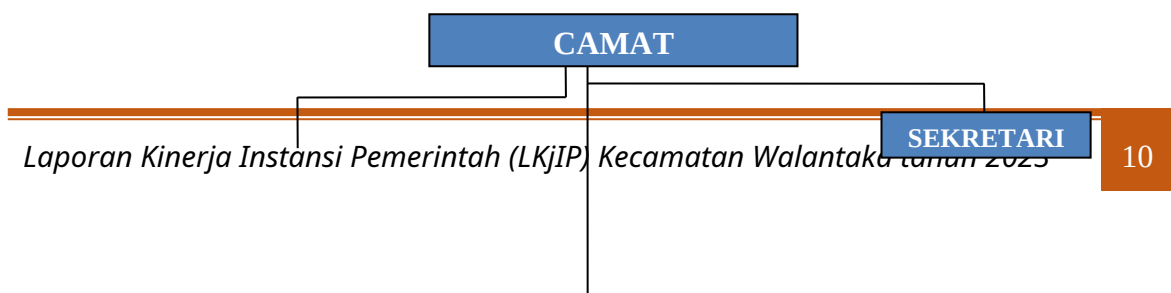
Untuk melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi :

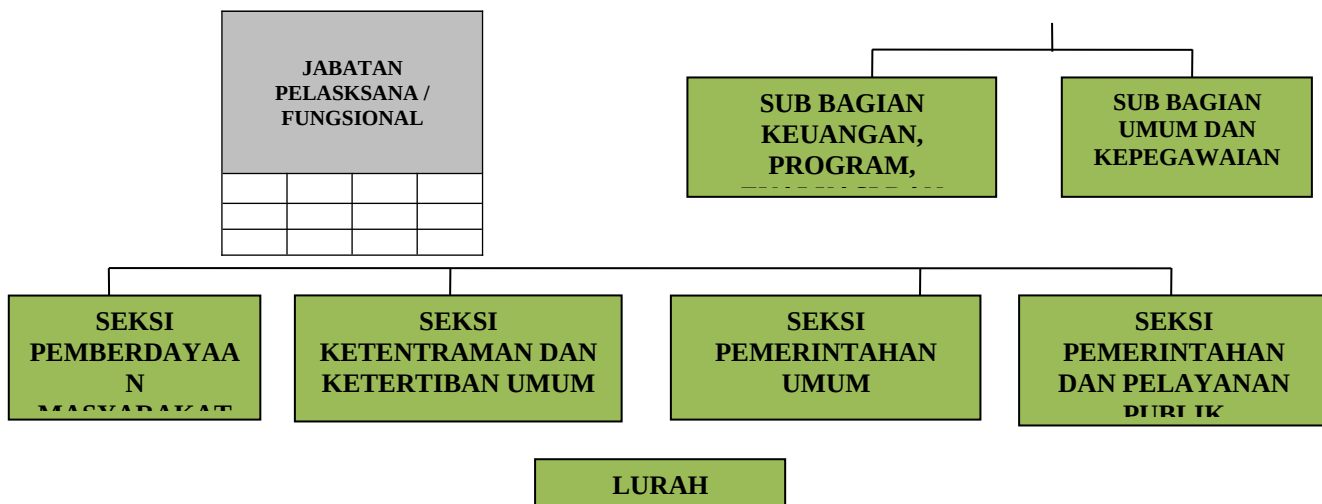
- a. Menetapkan Rencana Strategis Kecamatan untuk menjabarkan visi, misi, dan program Walikota dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menjabarkan kebijakan strategis dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Menyelenggarakan pengawasan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pelaporan.

Adapun Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut, terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemerintahan Umum;
- f. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
- g. jabatan Pelaksana dan Jabatan fungsional

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Walantaka





Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Walantaka Kota Serang didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data PNS Kecamatan Walantaka Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

Struktural			Fungsional				Jumlah
			Khusus		Umum		
Ess. 2	Ess. 3	Ess. 4	-	-	Sekretariat	Staf Teknis	
0	2	74	-	-	2	-	78

Tabel 1.2

Data PNS Kecamatan Walantaka Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Gol.	a	b	c	d	Jumlah
1.	IV	18	56	-	-	74
2.	III	1	1	-	-	2
3.	II	-	-	-	-	-
4	I	-	-	-	-	-
Jumlah						76

Tabel. I.3

Daftar Susunan Kepegawaian Kecamatan Walantaka Tahun 2023

NO	NAMA	NIP BARU	NAMA JABATAN	PANGKAT TERAKHIR
1	2	6	13	16
1	MUSLIM SHOLEH	19800410500811010	Camat Walantala	Pembina
2	RONI ROHIMAT	197512212008011003	SEKMAT	Penata Tk.I
3	AHMAD FAHRUDIN	197001281998031002	Kasi Pemerintahan Umum Kec.Walantaka	penata Tk. I
4	EUIS ELAWATI	198810122009022003	Kasi Trantibum Kecamatan Walantaka	Penata Tk. I
5	ARIS ARIZAL	198404062010011007	Kasi PMK Kelurahan Kecamatan Walantaka	Penata Tk. I
6	BASTARI	197603092010011012	Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik.Kecamatan Walantaka	Penata
7	MOHAMAD ALI	198002292011011001	Kasubag Keuangan dan PEP Kecamatan Walantaka	Penata Muda
8	YOSITA MAZALIANI	198007072011012002	Kasubag Umpeg Kec.Walantaka	Penata Tk. I
9	HUDARI	197801262014081002	Pelaksana Kecamatan Walantaka	Pengatur Muda Tk.I
s	JASMAN	198303082010011008	Pelaksana Kecamatan Walantaka	Pengatur Muda
11	AMINUDIN	197502092010011009	Kepala Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka	Penata
12	MOCHAMAD ANTONI NUGRAHA	198704102011011001	Sekretaris Kelurahan Nyapah	Penata Muda Tk.I
13	MARTONO	198403152014081001	Kasi PUM & Pely.Publik Kel.Nyapah	Penata Muda Tk.I
14	JAKAR	198512132010011001	Kepala Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka	Penata Tk.I
15	RAHMI	197406232005012007	Seklur Kelurahan	Penata Tk.I

NO	NAMA	NIP BARU	NAMA JABATAN	PANGKAT TERAKHIR
1	2	6	13	16
			Cigoong	
16	WULAN YULAN	198303212010012006	Kasi PMK kel.cigoong	Penata
17	TUTI FATMAWATI	197706232010012004	Kasi PUM & Pely.Publik Kelurahan Cigoong	Penata
18	IVA RISMAYATI	197604252008012011	Kasi Trantibum Kel. Cigoong	Penata
19	KOMALASARI	198009122008012008	Kepala Kelurahan Walantaka Kec.Walantaka	Penata Tk. I
20	ANDRIYANA	198512252014101001	Seklur Kel.Walantaka	Penata Muda Tk.I
21	ARIF RAHMAN HAKIM	198401072009021006	Kasi Trantib Kel.Walantaka	Penata Tk I
22	ENDAH FAJARWATI YANUAR	197801272009032004	Kasi PUM & Pely.Publik Kelurahan Walantaka	Penata
23	SRI ARINIE	196904121998032004	Kasi PMK Kel. Walantaka	Penata Tk I
24	TUTI SUMIYATI	196802222007012010	Kepala Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka	Penata Tk I
25	HANAFI	197703062008011001	Sekretaris Kelurahan Pengampelan	Penata Tk.I
26	ERAH SUKHAERAH	198302032010012007	KASI Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik Kel. Pengampelan	Penata Tk.I
27	RASIDI	197303052000031007	Kasi PMK Kel. Pengampelan	Penata Tk I

NO	NAMA	NIP BARU	NAMA JABATAN	PANGKAT TERAKHIR
1	2	6	13	16
28	SUIRAT	196904212008012011	Kasi Trantib Kel. Pengampelan	Penata Muda Tk. 1
29	JADO	197510012010011003	Kepala Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka	Penata
30	DICKY SEPTIAN	197509192009011002	Sekretaris Kelurahan Kiara	Penata
31	KHUSNUL KHOTIMAH	198212052008012004	Kasi PMK Kelurahan Kiara	Penata
32	ABDUROHIM	198603102011011003	Kasi PUM & Pely.Publik Kel. Kiara	Penata
33	AYU INA YULIANA	197609122010012004	Kasi Trantibum Kel. Kiara	Penata
34	MOCHAMAD NAFIRIN	197708022009021004	Kepala Kelurahan Pager Agung	Penata Muda Tk.I
35	IIS ISTIHAROH	197508172007012024	Sekretaris Kelurahan Pageragung	Penata TK.I
36	NASIROH	198309182009022008	Kepala Seksi PUM & Pely.Publik kel.Pager Agung	Penata Tk.I
37	FARID FIRDAUS	197612192010011007	Kasi Trantib Kelurahan Pager Agung	Pembina
38	SUPIHAH	198110092017042001	Kasi PMK Kelurahan Pager Agung	PenataMuda TK I
39	ASRORI	198201042014091002	Kepala Kelurahan Kalodran Kec.Walantaka	Penata
40	SITI AISAH	197905252009022007	Sekertaris Lurah Kel. Kalodran	Penata Tk.I
41	SITI NURHASANAH	198012282008012007	Kasi PUM & Pely.Publik Kel. Kalodran	Penata Tk I
42	KHOLID	198112012009021003	Kasi PMK Kelurahan	Penata TK.I

NO	NAMA	NIP BARU	NAMA JABATAN	PANGKAT TERAKHIR
1	2	6	13	16
			Kalodran	
43	TETI NURCAHYATI	198104182008012005	Kasi Trantibum Kelurahan Kepuren	PenataMuda TK I
44	SUBHAN	198204202010011017	Kepala Kelurahan Kepuren Kecamatan Walantaka	Penata
45	ATIN TESNAWATI	196911051991012002	Seklur kel.kepuren	Pembina
46	WAHYUNINGSIH	198107282006042009	Kasi PMK Kelurahan Kepuren	Penata Tk.I
47	UMAR ALI	197905152009021005	Kasi PUM & Pelayanan Publik Kel. Kepuren	Penata Tk.I
48	ANWARUDIN	198602242010011006	Kasi Trantib Kel. Kepuren	Penata
49	HIDAYATULLAH	197604022010011013	Kepala Kelurahan Teritih	Penata
50	CHANDRA SUHAIDA	196905301991032005	Seklur Kelurahan Teritih	Pembina
51	HAFID	198009122009021003	Kasi PMK Kel.Teritih	Penata
52	NENI KHAERATUNNISA	198411122011012002	Kasi PUM & Pely.Publik Kel.Teritih	Penata Muda Tk I
53	KHURIYAH	198409292011012002	Kasi Trantibum Kelurahan Teritih	Penata Muda Tk. I
54	MARYANI	196810112009061005	Kepala Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka	Penata
55	SARIKAH	198105132005022003	Sekretaris Kelurahan Pabuaran	Penata
56	JUWIZAT	197605182011012001	Kasi PMK Kelurahan	Penata

NO	NAMA	NIP BARU	NAMA JABATAN	PANGKAT TERAKHIR
1	2	6	13	16
			Pabuaran	
57	DIAN NURLAELI	198603132009022007	Pelaksana Kelurahan Pabuaran	Pengatur Tk.I
58	SUENI	196605121988031015	Kasi Trantib Kel.Pabuaran	Penata Tk.I
59	TATI SUMYATI	197507202007012011	Kasi PUM & Pely.Publik Kel.Pabuaran Kec.Walantaka	Penata
60	JUNAEDI	197612112008011003	Kepala Kelurahan Pasuluhan	Penata Tk.I
61	BINA SAEFUL CHAERUDIN	197009052005011005	Sekretaris Kelurahan Pasuluhan	Penata Muda
62	RAKIMAN	196701011991031012	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasuluhan Kec.Walantaka	Penata Tk.I
63	USWATUN HASANAH	198105062011012001	Kasi Trantib Kelurahan Pasuluhan	Penata
64	KOKOM KOMARUROHMA H	197106032006042013	Kasi PUM & Pelayanan Publik Kel.Pasuluhan	Penata
65	SAIDAH	198008202010012012	Kepala Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Walataka	Penata Tk.I
66	ARIFUDDIN	197906042008011008	Sekretaris Kelurahan Tegal Sari	Pembina
67	NANI KUSTINI	197512202008012006	Kasi PMK Kelurahan Tegal Sari	Penata Muda TK. I
68	JULI PRASETIAWATY	198107032014062003	Kasi Trantibum Kelurahan Tegal Sari	Penata
69	YUSUP	197802132009021001	Kasi PUM & Pely.Publik Kel. Tegal Sari	Pembina

NO	NAMA	NIP BARU	NAMA JABATAN	PANGKAT TERAKHIR
1	2	6	13	16
70	NINIS NASIFAH	197308011994032006	Kepala Kelurahan Pipitaan Kec.Walantaka	Pembina
71	SAIFUL	197007061990031003	Sekretaris Kelurahan Pipitan	Penata Tk .I
72	SRI MARGORINI	196610111986032005	Kasi Pemerintahan Umum & Pelayanan Publik Kelurahan Pipitan	Pembina Tk.I
73	ANI NUR STYAWATI	198312072019022002	Kasi Trantib Kelurahan Pipitan	Penata Muda Tk.I
74	RETNO DAMAYANTI	198009092010012035	Kepala Kelurahan Lebak Wangi	Penata
75	SUPARTA WIJAYA	19851112011011001	Seklur Kel.Lebak Wangi	Penata Tk. I
76	RITA ROSITA	197204152007012012	Kasi PMK Kel. Lebak Wangi	Penata
77	PANJI SUKRIATNA	198606102010011008	Kasi Pum & Pely.Publik Kel. Lebak Wangi	Penata Muda
78	AHMAD ZULFIKAR	198506272009021004	Kasi Trantibum Kelurahan Lebak Wangi	Pembina

Tabel 1.4
Data PNS Kecamatan Walantaka Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	19
2.	S1	46
3.	Diploma / D-III	9
4	SLTA (sederajat)	2
Jumlah		78

B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1.1 Kondisi Geografis

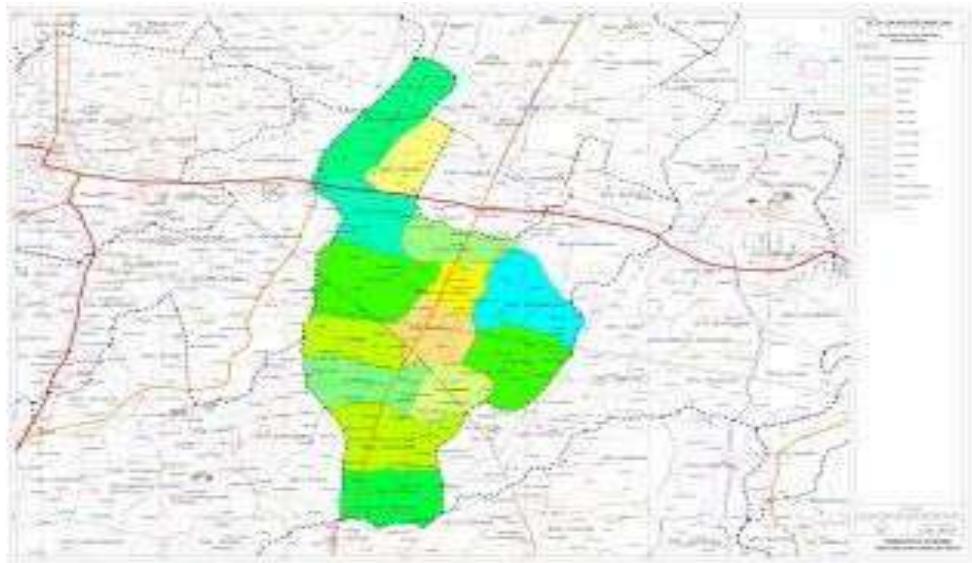
1.1.1 Batas Administrasi Wilayah

Secara Administratif Kecamatan Walantaka, terdiri dari 14 Kelurahan dengan jumlah 347 RT dan 80 RW. Dengan Ibu Kota Kecamatan berada di Kelurahan Pipitan. Dengan luas wilayah 36,56 km² terletak pada jarak ± 11 km di Pusat Pemerintahan Kota Serang dan ± 9 km jarak ke Pusat Provinsi Banten dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kragilan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciruas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Petir dan Cikeusal

Gambar 1.2

Peta Administrasi Kecamatan Walantaka



Kecamatan Walantaka memiliki 14 kelurahan dengan luas wilayah yang terbagi seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Walantaka

N O	KELURAHAN	LUAS (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
1.	Nyapah	2,60	6,22
2.	Lebakwangi	2,80	6,69
3.	Cigoong	2,16	5,16
4.	Tegalsari	2,81	6,72
5.	Pasuluhan	2,15	5,14
6.	Pabuaran	3,25	7,84
7.	Walantaka	2,81	6,72
8.	Pengampelan	2,86	6,84
9.	Pipitan	1,16	2,77
10.	Kiara	4,43	10,59
11.	Pageragung	4,96	11,86
12.	Kalodran	3,91	9,35
13.	Kepuren	1,57	3,75
14.	Teritih	4,33	10,35
KECAMATAN WALANTAKA		41,83	100,00

Sumber : Kecamatan Walantaka Dalam Angka, 2023

1.1.2 Kondisi Topografis

Bentuk Topografi di wilayah Kecamatan Walantaka sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian rata – rata $\pm 500 - 700$ m dari permukaan laut. Iklim di wilayah Kecamatan Walantaka secara umum tidak berbeda jauh dengan daerah lain di Kota Serang. Sebagian bagian dari daerah tropis yang hanya mengenal musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Kecamatan Walantaka memiliki curah hujan tertinggi pada bulan Januari yaitu sebesar 362.70 mm dan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan tersebut yaitu 27 hari artinya hanya 4 hari saja pada Bulan tersebut tidak mengalami hujan.

1.2 Kondisi Demografis

Secara administratif Kecamatan Walantaka terbagi menjadi 14 (Empat Belas) Kelurahan, 80 (Delapan Puluh) Rukun Warga, 347 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) Rukun Tetangga. Berdasarkan data Walantaka dalam angka tahun 2023 Jumlah penduduk di Kecamatan Walantaka tercatat sebanyak 106,541 (Seratus Enam Lima Ratus Empat Puluh Satu) jiwa, yang terdiri atas 53.980 (Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh) jiwa laki-laki dan 52.561 (Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu) jiwa perempuan.

Tabel 1.6
Jumlah RT, RW dan Kampung/ Lingkungan
Per Kelurahan

NO	KELURAHAN	RW	RT
1	PIPITAN	7	36
2	PABUARAN	4	14
3	PENGAMPELAN	7	31
4	PAGER AGUNG	5	25
5	PASULUHAN	4	14
6	WALANTAKA	5	12
7	KALODRAN	7	24
8	TERITIH	10	55
9	KEPUREN	5	27
10	KIARA	6	40
11	NYAPAH	6	18
12	TEGALSARI	5	20
13	CIGOONG	4	16
14	LEBAKWANGI	5	15
JUMLAH		80	347

1.3 Kondisi Sosial

1.3.1 Sarana Pendidikan

Pada tahun ajaran 2022/2023 tercatat 12 unit pendidikan RA, 42 SD/MI, 24 SMP/MTs, dan 10 SMA/ MA di Kecamatan Walantaka. Jumlah murid dari seluruh jenjang pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta sebanyak 18.449 orang. Sebanyak 37,5 persen sekolah merupakan sekolah negeri. Rasio Murid-Guru SD/MI di Kecamatan Walantaka adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Beban mengajar seorang guru SD/MI adalah 21 orang siswa.

1.3.2 Fasilitas Kesehatan

Pada tahun 2022 terdapat 44 orang tenaga medis/paramedis yang terdiri dari 2 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 22 orang bidan, 9 orang perawat, 1 orang mantri kesehatan, 6 orang dukun bayi terlatih, 1 orang ahli gizi, 1 orang apoteker, dan 7 orang tenaga medis lainnya di Puskesmas Walantaka. Untuk sarana dan prasarana kesehatan masyarakat terdapat 4 unit poliklinik, 2 unit puskesmas, 2 unit puskesmas pembantu, dan 4 apotek di Kecamatan Walantaka.

1.4 Kondisi Ekonomi

Kecamatan Walantaka memiliki unggulan-unggulan potensi daerah yang menjadi modal dasar perekonomian terutama dari Pasar tradisional, gerai-gerai, los dan kios-kios, serta minimarket dan took kedai. Sarana lembaga keuangan Bank yang terdapat di Kecamatan Walantaka terdiri dari 1 Bank Umum Pemerintah yang terletak di Kelurahan Kalodran.

Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang

dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun.

Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Luas panen untuk tanaman sayuran adalah luas tanaman yang dipanen sekaligus/habis/ dibongkar dan luas tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis. Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen/tanaman yang menghasilkan pada bulan/ triwulan laporan.

Rumah Tangga Perikanan Tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. Rumah Tangga Perikanan Budidaya adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Walantaka Kota Serang, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja

No	Nama Barang	Volume	Kondisi		
			baik	Kurang baik	rusak
1	Rumah Dinas	1 unit	-	1	-
2	Kantor	34 unit	34	-	-
3	Motor Dinas	40 unit	6	34	-
4	Meja Rapat	5 buah	4	1	-
5	Meja Kerja	109 buah	65	12	32
6	Kursi Kerja	83 buah	70	10	12
7	Mobil Dinas	3 unit	1	2	-
9	Lemari	68 buah	48	-	20

No	Nama Barang	Volume	Kondisi		
			baik	Kurang baik	rusak
10	Printer	35 unit	21	-	24

C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN DAERAH

1. Isu Strategis

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD, karena menjadi dasar utama pada perumusan arah pembangunan jangka menengah yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Isu strategis sesuai dengan RKPD Perubahan Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan
2. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah sosial
3. Infrastruktur wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana
3. Peningkatan perekonomian daerah
4. Penanggulangan pandemi Covid-19 beserta dampaknya
5. Penguatan reformasi birokrasi.

2. Permasalahan Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 dalam pelaksanaan kegiatan, adalah sebagai berikut:

a) Optimalisasi Pelayanan Publik

Optimalisasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalitas pelayanan publik dapat dicapai apabila pelayanan prima dijalankan. Pelayanan prima dapat dicapai apabila faktor internal dan eksternal dari suatu OPD penyelenggara pelayanan mendukung.

Faktor internal adalah berupa pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, sarana dan prasarana, SDM aparatur, dan legitimasi (dasar hukum). Sedangkan faktor eksternal adalah berupa partisipasi masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadikannya optimal. Namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut mensukseskan suatu program yang telah dicanangkan

pemerintah. Perlu adanya kesadaran moral dan hukum oleh tiap-tiap anggota masyarakat. Pemerintah melakukan sosialisasi namun hasil akhir ditentukan oleh partisipasi masyarakat.

Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan tersebut terkait dengan instansi penyedia, proses pelayanan dan manfaat atau hasil yang diterima dari pelayanan tersebut.

- b) Tingkat stunting dan gizi buruk pada ibu hamil dan balita yang masih tinggi
- c) Sarana dan prasarana kantor pemerintahan yang belum terpenuhi dengan baik
- d) Kurangnya sumberdaya manusia secara kualitas dan kuantitas
- e) Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di wilayah Walantaka
- f) Infrastruktur wilayah masih banyak yang rusak sehingga aksesibilitas menjadi terhambat
- g) Penimbunan sampah di beberapa lokasi akibat tidak adanya sarana tempat pembuangan sampah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, melalui RPJMD inilah perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Dokumen Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2019-2023. Dokumen Perubahan RPJMD disusun secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan. Untuk maksud inilah RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 disusun agar dapat menjadi cetak biru rencana pembangunan jangka menengah di Kota Serang Tahun 2018-2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Serang telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yang didalamnya memuat visi, misi, kebijakan dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Serang periode Tahun 2018-2023. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD Kota Serang ini merupakan dokumen perencanaan yang integral dengan seluruh dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah di tingkat nasional dan provinsi sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023 menjadi kebutuhan untuk dilakukan meskipun saat ini tengah berjalan di tahun ketiga, mengingat sejumlah alasan dan kebutuhan berdasarkan perkembangan kondisi yang terjadi serta sebagai wujud upaya penyalarsan perubahan kebijakan nasional dan provinsi. Namun demikian, nantinya sejumlah perubahan, penyalarsan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas tetap didasarkan pada upaya pencapaian visi dan misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Serang periode Tahun 2018-2023.

Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan nomenklatur terbaru serta memiliki tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran yang berorientasi kepada kinerja hasil dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara operasional Perubahan Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2018-2023 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023. Namun demikian, saat penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2018-2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Perencanaan strategis menentukan “diarahkan kemana” suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Strategi umum untuk pencapaian visi dan misi Kecamatan Walantaka adalah :

1. Meningkatkan tugas dan fungsi Kelurahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan fungsi pelayanan umum, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memacu meningkatnya kualitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat terutama melalui aspek pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat dan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur.
3. Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan industri kecil (home industri).
4. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban untuk menjamin stabilitas yang kondusif dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang

berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Walantaka tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Serang, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kota Serang 2018-2023 kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Walantaka adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa.
2. Peningkatan Akuntabilitas, profesional, dan bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan.
3. Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada Masyarakat.
4. Peningkatan pemberdayaan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
6. Peningkatan operasi penegakan Peraturan Daerah
7. Peningkatan pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana.

Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2018-2023 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Kecamatan Walantaka ada pada **misi ke-4** yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.”

Misi ke-4 ini memiliki penjabaran sebagai berikut :

Tujuan daerah :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, dengan indikator tujuan daerah :

- Indeks Reformasi Birokrasi Daerah.

Sasaran Daerah :

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator sasaran daerah :

- Indeks kepuasan masyarakat (SKM)
- Nilai LPPD Kota
- Hasil Evaluasi AKIP
- Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pada Perubahan RENSTRA ini dilakukan penyelarasan indikator setelah dilakukan pemetaan pemutakhiran nomenklatur program dan kegiatan dengan tak

lepas dari hasil koordinasi dengan tim penyusun RPJMD Kota Serang sehingga menghasilkan perubahan sebagai berikut:

Tujuan Renstra :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan.

Indikator Tujuan > **Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan**

Sasaran Renstra:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan

Indikator Sasaran :

✓ Hasil evaluasi LKjIP

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kecamatan Walantaka

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan	Tata kelola Pemerintahan yang baik melalui Tata Keluhan dan Kecamatan, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan Masyarakat kelurahan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan	Mempersiapkan data dan rencana Tata Pemerintahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dengan upaya forum konsultasi publik dan pengadaan sistem aplikasi data base internal pemerintahan	Menguatkan proses Tata Pemerintahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dengan melengkapi komponen standar pelayanan dan menguatkan data base internal pemerintahan	Mengoptimalkan Pemerintahan Umum melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	Pencapaian kinerja Pemerintahan Umum melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Pencapaian kinerja Pemerintahan Umum melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	
			Mempersiapkan data dan rencana Kesejahteraan Sosial melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan sosial dan senantiasa menggiatkan masyarakat dalam kehidupan berkeagamaan dan sosial	Menguatkan proses Kesejahteraan Sosial melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan sosial dan senantiasa menggiatkan masyarakat dalam kehidupan berkeagamaan dan sosial	Mengoptimalkan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, peningkatan efektifitas kegiatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pencapaian kinerja Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, peningkatan efektifitas kegiatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pencapaian kinerja Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, peningkatan efektifitas kegiatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Mempersiapkan data dan rencana Ekonomi dan Pembangunan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan rekomendasi perekonomian dan pembangunan	Menguatkan proses Ekonomi dan Pembangunan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Mengoptimalkan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pencapaian kinerja Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pencapaian kinerja Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Mempersiapkan data dan rencana Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Menguatkan proses Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka	Mengoptimalkan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pencapaian kinerja Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pencapaian kinerja Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Mempersiapkan data dan rencana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka	Menguatkan proses Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka	Mengoptimalkan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pencapaian kinerja Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pencapaian kinerja Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

Merujuk pada hasil pemetaan Rencana Kerja Kecamatan Walantaka tahun 2023 berdasarkan pemerendagri nomor 90 tahun 2019 yang kemudian dilakukan pemutakhiran dengan peermendagri nomor 50 tahun 2020 tanpa mengindahkan hakikat penyusunan perubahan renstra ini tetap untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2018-2023, maka perlu diperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Walantaka. Sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Tahun 2018-2023 disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Walantaka tiap tahunnya sebagai penjabaran dari RAPBD Kota Serang yang telah disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD), APBD tahun 2023 disahkan melalui Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

RKA dan DPA merupakan komitmen Kecamatan Walantaka untuk mencapai kinerja sebaik - baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang diterima sebagai perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang, dengan tetap mengacu pada pencapaian Visi dan Misi Kota Serang.

RKA dan DPA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana ini menjabarkan Target Kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan Organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Kecamatan Walantaka telah mengidentifikasi 2 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2019-2023, untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kerjanya ini dirumuskan dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (RS) diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Walantaka menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam akhir tahunnya. Disini indikator kinerja untuk setiap kegiatan harus diidentifikasi.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Walantaka menetapkan Target Kinerja (kuantitatif) dan (kualitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan karena dengan RKA/DPA tahun 2023 ini kecamatan memiliki anggaran yang tersendiri dan dikelola sendiri.

Sehubungan dengan rencana kerja Kecamatan Walantaka Tahun 2023, berikut kami tampilkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Walantaka Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 2.2

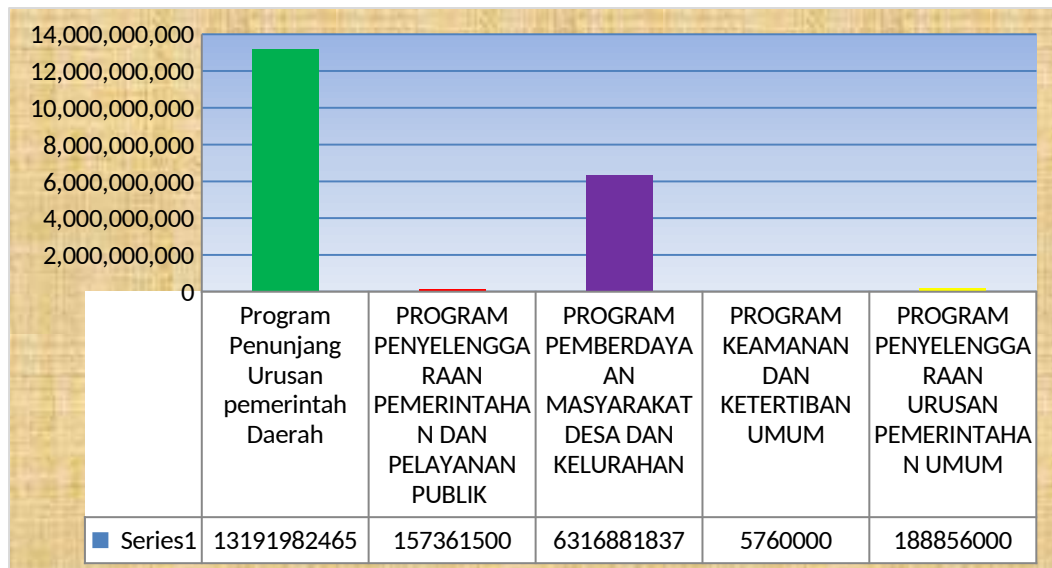
Program Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI (Rp)
	19.860.841.802
Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	13.191.982.465
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.631.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.775.946.891
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.464.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.400.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.777.678

PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI (Rp)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.310.900
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.366.312.696
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.139.300
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	157.361.500
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.496.500
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.365.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.316.881.837
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.999.951.837
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	251.520.000
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	65.410.000
PROGRAM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.760.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.760.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	188.856.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	188.856.000

Grafik 2.1

Tabel Program Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2023



Dari grafik tersebut diatas dapat terlihat pencapaian realisasi tertinggi pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu sebesar Rp. 6.316.881.837, pencapaian program tersebut disebabkan karena dari pencapaian dari setiap kegiatan pada program tersebut sangat tinggi, terutama kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan acuan Kinerja Yang digunakan oleh Kecamatan Walantaka untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Walantaka.

Tabel Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan	Tata kelola Pemerintahan yang baik melalui Tata pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan Masyarakat kelurahan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan pada Masyarakat Walantaka	Mempersiapkan data dan rencana Tata Pemerintahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dengan upaya forum konsultasi publik dan pengadaan sistem aplikasi data base internal pemerintahan	Menguatkan proses Tata Pemerintahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dengan melengkapi komponen standar pelayanan dan menguatkan data base internal pemerintahan	Mengoptimalkan Pemerintahan Umum melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional dengan mensinergikan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	Pencapaian kinerja Pemerintahan Umum melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional dengan mensinergikan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	Pencapaian kinerja Pemerintahan Umum melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional dengan mensinergikan tugas forum koordinasi	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program	
							pimpinan kecamatan		
			Mempersiapkan data dan rencana Kesejahteraan Sosial melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan sosial dan senantiasa menggiatkan masyarakat dalam kehidupan berkeagamaan dan sosial kemasyarakatan	Menguatkan proses Kesejahteraan Sosial melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan sosial dan senantiasa menggiatkan masyarakat dalam kehidupan berkeagamaan dan sosial kemasyarakatan	Mengoptimalkan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, peningkatan efektifitas kegiatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pencapaian kinerja Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, peningkatan efektifitas kegiatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pencapaian kinerja Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, peningkatan efektifitas kegiatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
			Mempersiapkan data dan rencana Ekonomi dan Pembangunan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan rekomendasi perekonomian dan pembangunan	Menguatkan proses Ekonomi dan Pembangunan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka					
			Mempersiapkan data dan rencana Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk	Menguatkan proses Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk	Mengoptimalkan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pencapaian kinerja Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pencapaian kinerja Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program
			meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka	meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka				
			Mempersiapkan data dan rencana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka	Menguatkan proses Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka	Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pencapaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pencapaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja memuat target-target yang sudah dimuat dalam PK (penetapan Kinerja) dan penjelasannya apakah ada perbedaan antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Kaitannya perjanjian kinerja yang tertuang dalam satu Perencanaan kinerja, dimana perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

TABEL 2.4**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN WALANTAKA**

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Nilai	82
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan	Hasil evaluasi LKjIP	Nilai	67

2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja Kecamatan Walantaka tahun 2023, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Kecamatan Walantaka tahun 2023, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Tabel 2.5

Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan Walantaka Tahun 2023

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
									JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES				
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	%																		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan			Hasil evaluasi LKjIP	skor		21.259.391.831																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%		770.586 14.170.																
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah presentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dok	11	032.250 230.																
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	.784.000 68	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	.680.000 37	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATE	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA Kepegawaian	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-																	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-																	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	55	14.400.000	√		√	√			√				√					
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45																	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln		844.264																
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.857.690							√									
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	38.504.810	√			√			√					√				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	6.141.784																
				Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	52.800.000	√			√			√					√				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Paket	1	10.112.980	√			√			√					√				

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR Kinerja yang Disediakan	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-																	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	30.000.000	√			√			√										
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	46.427.000	√			√			√										
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	-																	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		358.000 569.																	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua	unit																			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel	Unit																			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	unit	1	398.444.000	√																
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	1	170.914.000	√																
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	unit																			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana ruang kantor	unit																			

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI	KEMAMPUAN	SATUAN bln	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12	1.181.779.200	√			√			√			√								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan listrik yg dibayar	bln	1	73.630.000	√			√			√			√								
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebersihan kantor dan petugas keamanan	bln	1	1.108.149.200	√			√			√			√								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		776.500																		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	8	51.522.500	√			√			√			√								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	6	78.000.000	√			√			√			√								
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	15	22.710.000	√			√			√			√								
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang dipelihara	unit	2	42.544.000	√																	
								974.559.339																		
								785.715.075																		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM Kecamatan Walantaka	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp) 61.377.485	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.500.000 5																	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.500.000 5	√			√			√					√					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	%	100	.122.485 23																	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	995.355	√			√													
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	4.586.758	√																
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan minum	bln	1	509.172																	
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	5.504.000	√			√			√					√					
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	3.917.200																	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	7.610.000	√			√			√					√					
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	unit		-																	
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	unit																			
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan	unit																			

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Lapangan	INDIKATOR KINERJA Operasional Roda Dua	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit																			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	.645.000	24																
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln	1	.645.000	24																
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln		-																	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	.110.000	8																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA ANSIR Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	INDIKATOR KINERJA jumlah unit kendaraan yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA 2	ANGGARAN (Rp) 4.770.000	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-																
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	2	3.340.000															
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1																
			Kelurahan Cigoong					59.113.302															
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.500.000	5														
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.500.000	5														

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Bulan/Trimester/Semester/SKPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.114.802 ²⁴																	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	999.937																	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	4.606.465																	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan minum	bln	1	515.500																	
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	5.824.000																	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	4.733.900																	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	7.435.000																	
				Pengadaan Barang	Jumlah	unit																			

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Milik Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDIKATOR KINERJA Pembangunan BMD	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua	unit																			
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit																			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.020.000	19																
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12	-																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDIKATOR KINERJA jumlah Fasilitas Jasa Listrik	SATUAN bln	TARGET KINERJA 1	ANGGARAN (Rp) 19.020.000	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln		-															
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.478.500															
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	2	7.138.500															
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-																
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	2	3.340.000															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Peningkatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	INDIKATOR KINERJA jumlah gedung kantor yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA 1	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
			Kelurahan nyapah					54.553.611															
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.960.000	6														
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.960.000	6														
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.615.111	17														
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	975.000															
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	3.887.779															
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan minum	bln	1	507.674															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	5.312.000																
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	3.922.658																
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	3.010.000																
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	unit		-																
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	unit																		
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	unit																		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Ruang kantor	lokal																		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Kantor, Badan/Bangunan Lainnya	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.020.000 21																
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln	1	.020.000 21																
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln																		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.958.500 8																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA ANSIR Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	INDIKATOR KINERJA jumlah unit kendaraan yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA 2	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	7.578.500															
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	2	1.380.000															
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1																
			Kelurahan Pengampelan					51.490.947															
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.500.000	5														
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.500.000	5														

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.	
				Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	538.947														
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	978.204														
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	3.879.700														
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan minum	bln	1	636.543														
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	2.944.000														
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	3.890.500														
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	6.210.000														

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDIKATOR KINERJA Jumlah pengadaan BMD	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	unit																		
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit																		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.420.000	21															
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDIKATOR KINERJA jumlah Fasilitas Jasa Listrik	SATUAN bln	TARGET KINERJA 1	ANGGARAN (Rp) .420.000 ²¹	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln																			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.032.000 ⁶																	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	2	3.870.000																	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-																		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor	unit		2.162.000																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA yang dipelihara	SATUAN	TARGET KINERJA ₂	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1																	
			Kelurahan Kiara					49.857.277																
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.640.000	5															
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.640.000	5															
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.323.277	17															
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	.033.000	1															
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	4.095.291																
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan	bln																		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA minum	SATUAN	TARGET KINERJA 1	ANGGARAN (Rp) 808.344	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	2.944.000															
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	3.732.642															
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	4.710.000															
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD			-															
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	unit																	
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Mesin Lainnya	INDIKATOR KINERJA Jumlah Perawatan Kantor	SATUAN Unit	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.020.000	21																
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln	1	.020.000	21																
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln																			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.874.000	5																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA ANSIR Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	INDIKATOR KINERJA jumlah unit kendaraan yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA 2	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	2.980.000															
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	2	2.894.000															
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1																
			Kelurahan Pager Agung					59.421.313															
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.300.000															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	Kegiatan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN dok	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
									7														
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.427.313	21														
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	1.010.355															
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	4.429.700															
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan minum	bln	1	683.258															
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	2.944.000															
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	4.000.000															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	INDIKATOR KINERJA jumlah kebumaherutan SKPD Luar dan Dalam Daerah	SATUAN bln	TARGET KINERJA ¹²	ANGGARAN (Rp) 8.360.000	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD																			
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	unit																		
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit																		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	bln	100	.040.000 ²¹																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA Daerah	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln	1	.040.000	21															
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln																		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.654.000	9															
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	2																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA ANSIR Kecamatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	INDIKATOR KINERJA jumlah unit kendaraan yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA -	ANGGARAN (Rp) 6.760.000	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	2	2.894.000															
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1																
			Kelurahan Kalodran					60.306.906															
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.300.000	7														
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.300.000	7														
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.584.406	20														

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	INDIKATOR KINERJA perencanaan kebutuhan alat listrik	SATUAN bln	TARGET KINERJA 1	ANGGARAN (Rp) 1.018.570	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	3.813.750																
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan minum	bln	1	598.086																
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	2.944.000																
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	4.000.000																
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah kebutuhan surat kabar	bln	-	-																
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi Kunjungan Tamu Tk Kota	bln	-	-																
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	8.210.000																
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah pengadaan BMD																			

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Pemerintah Daerah	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	unit																		
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit																		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.040.000	21															
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDIKATOR KINERJA jumlah Fasilitas Jasa Listrik	SATUAN bln	TARGET KINERJA 1	ANGGARAN (Rp) .040.000 ²¹	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln																		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.382.500	11															
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	2																	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	8.488.500																
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor	unit		2.894.000																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA yang dipelihara	SATUAN	TARGET KINERJA ₂	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1																
			Kelurahan Kepuren					61.775.223															
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.300.000	7														
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.300.000	7														
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.371.223	16														
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	820.355															
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	3.843.610															
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan	bln		1.253.258															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA minum	SATUAN	TARGET KINERJA 1	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	2.944.000															
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	4.000.000															
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah kebutuhan surat kabar	bln	-																
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi Kunjungan Tamu Tk Kota	bln	-																
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	3.510.000															
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD																		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Kegiatan Perencanaan Kendaraan Dinas Jabatan	INDIKATOR KINERJA Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	SATUAN unit	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.					
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit																				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.640.000	26																	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln	1	.640.000	26																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	INDIKATOR KINERJA Kuantitatif Jumlah pelayanan Umum kantor	SATUAN bln	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.464.000	11																
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	2																		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	7.140.000																	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	2	4.324.000																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	INDIKATOR KINERJA jumlah gedung kantor yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA 1	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
			Kelurahan Terith					69.438.122															
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.397.930	12														
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.397.930	12														
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.518.192	14														
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	631.000															
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	4.017.192															
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan	bln		1.000.000															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA minum	SATUAN	TARGET KINERJA ₁	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	3.570.000																
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	3.290.000																
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah kebutuhan surat kabar	bln	-																	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi Kunjungan Tamu Tk Kota	bln	-																	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	2.010.000																
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	Unit		-																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Kegiatan Perencanaan Kendaraan Dinas Jabatan	INDIKATOR KINERJA Kuantitatif Dinas Jabatan Roda Dua	SATUAN unit	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit																			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.440.000	22																
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln	1	.440.000	22																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	INDIKATOR KINERJA Kuantitatif Jumlah pelayanan Umum kantor	SATUAN bln	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.082.000 20															
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	2	4.450.000															
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	3.600.000															
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	2	7.280.000															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Pembinaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	INDIKATOR KINERJA jumlah gedung kantor yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA 1	ANGGARAN (Rp) 4.752.000	RENCANA PELAKSANAAN												KET.	
			Kelurahan Pabuaran					47.089.581														
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.040.000	5													
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.040.000	5													
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.230.581	15													
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	885.355														
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	3.960.140														

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Makanan Rumah Tangga	jumlah penyediaan makanan dan minum	bln	1	825.086																
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	4.800.000																
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	2.750.000																
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	2.010.000																
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	Unit																		
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	unit																		
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	INDIKATOR KINERJA Jumlah Perabotan Kantor	SATUAN Unit	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.					
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.640.000	20																	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln	1	.640.000	20																	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln																				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.179.000	6																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA ANSIR Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	INDIKATOR KINERJA jumlah unit kendaraan yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA 2	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	4.017.000																
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	2	2.162.000																
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1																	
			Kelurahan Pasuluhan					54.075.297																
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.780.000	4															
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk	dok		.780.000	4															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Kegiatan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	INDIKATOR KINERJA Kecamatan	SATUAN	TARGET KINERJA 2	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.415.797 ¹⁹															
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	885.355															
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	6.000.822															
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan minum	bln	1	1.019.620															
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	4.800.000															
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	2.900.000															
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	3.810.000															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDIKATOR KINERJA Jumlah pengadaan BMD	SATUAN Unit	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	unit																		
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit																		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.420.000	17															
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln	1	.420.000																	
					jumlah fasilitas publikasi kantor	bln																			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln																			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.459.500																	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	2																		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	7.317.500																	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor	unit		5.142.000																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA yang dipelihara	SATUAN	TARGET KINERJA ₂	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1																		
			Kelurahan tegalsari					53.354.872																	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.780.000	4																
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.780.000	4																
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.515.872	16																
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	986.414																	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	2.786.200																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN bln	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Penyediaan Makanan Rumah Tangga	jumlah penyediaan makanan dan minum	bln	1	683.258															
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	4.800.000															
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	2.750.000															
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	4.510.000															
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	Unit																	
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	unit																	
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	INDIKATOR KINERJA Jumlah Perabotan Kantor	SATUAN Unit	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.					
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.620.000	24																	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln	1	.620.000	24																	
					jumlah fasilitas publikasi kantor	bln																				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln																				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.439.000	7																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA ANSIR Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	INDIKATOR KINERJA jumlah unit kendaraan yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA 2	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	2.385.000																	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	2	2.894.000																	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1																		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.160.000																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.780.000	4																	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.780.000	4																	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.300.180	16																	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	.044.634	1																	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	2.747.460																		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan minum	bln	1	698.086																		
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	4.800.000																		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	INDIKATOR KINERJA jumlah kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	SATUAN bln	TARGET KINERJA ¹	ANGGARAN (Rp) 2.750.000	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	4.260.000															
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	Unit																	
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua	unit																	
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Kegiatan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	INDIKATOR KINERJA Jumlah Ruang Kantor	SATUAN Unit	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.640.000 26																			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln	1	.640.000 26																			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln																					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.604.000 12																			

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA ANSIR Kegiatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	INDIKATOR KINERJA jumlah unit kendaraan yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA 2	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	6.540.000																
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	6.540.000																
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	2	2.894.000																
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	3.170.000																
			Kelurahan Lebakwangi					43.536.959																
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan kelurahan	dok	1	.640.000	5															
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan	dok	2	.640.000	5															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN emesteran SKPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.						
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	100	.118.459	11																		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat listrik	bln	1	-																			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bln	1	-																			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan makan dan minum	bln	1	485.000																			
				Penyediaan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bln	1	1.920.000																			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bln	1	4.703.459																			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bln	12	4.010.000																			
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengadaan																						

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Kegiatan Pemerintah Daerah	INDIKATOR KINERJA BMD	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.					
				Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua	unit																				
				Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit																				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit																				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang kantor	Unit																				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	100	.020.000	21																	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	buah	12																			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	jumlah Fasilitas Jasa Listrik	bln		.020.000	21																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Daya Air dan Listrik	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA ₁	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
					jumlah fasilitas publikasi kantor	bln																		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum kantor	bln																		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	.758.500	5															
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	2																	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	-	3.728.500																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDIKATOR KINERJA jumlah gedung peralatan kantor yang dipelihara	SATUAN unit	TARGET KINERJA 2	ANGGARAN (Rp) 2.030.000	RENCANA PELAKSANAAN												KET.					
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1																			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SOP/SP/KETENTUAN	%		169.033.000																		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	85	72.158.000																		
				Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Musrenbang Tk Kecamatan	Laporan	1	.320.000	54	√																
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kelurahan yg dinilai dalam Lomba	dok	14	17.838.000	17	√																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA Kecamatan	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	.510.000	11														
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Forum Konsultasi Publik Kecamatan		1	.510.000	11														
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	.365.000	85														
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah SPPT PBB terdistribusi	Laporan	1	.365.000	85				√			√							
			PROGRAM PEMBERDAY		persentase kategori	%		6.302.906.170															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	ASASAN PROGRAM DESA DAN KELURAHAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA berkembang	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Walantaka	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Walantaka	%	90	244.936 336.																	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.921.500 15	√																
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	53.740.000				√													
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ormas	1	583.436 266.	√				√				√					√			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1																		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cigoong	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Cigoong	%	90	518.703 374.																	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.904.750 15	√																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Pembangunan di Desa	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	.310.000 49					√									
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ormas	1	303.953 309.	√		√				√	√			√			√
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1															
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Nyapah	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Nyapah	%	90	065.190 365.														
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.640.000 15					√									

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	INDIKATOR KINERJA Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	SATUAN Unit	TARGET KINERJA 5	ANGGARAN (Rp) .510.000	RENCANA PELAKSANAAN												KET.	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ ormas	1	915.190	295.	√		√	√			√		√	√			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1															
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pangampelan	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Pangampelan	%	90	399.165	446.													
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.000.000	15	√												
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	.400.000	53				√									

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Kegiatan Masyarakat di Kelurahan	INDIKATOR KINERJA pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	SATUAN pokmas/ormas	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	377.999.165																	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kiara	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Kiara	%	90	376.236	540.																
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.608.000	15																
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	.700.000	53						√										
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ormas	1	068.236	471.				√			√								√	
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1																		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Pemberdayaan Kelurahan Pager Agung	INDIKATOR KINERJA Pemberdayaan Kelurahan Pager Agung	SATUAN %	TARGET KINERJA 90	ANGGARAN (Rp) 097.060 554.	RENCANA PELAKSANAAN												KET.					
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.000.000 15	√																	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	52.800.000		√																
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ ormas	1	297.060 486.	√		√			√						√						
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1																			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalodran	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Kalodran	%	90	467.060 454.																		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.000.000 15	√																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	.500.000 43																
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ormas	1	967.060 395.	√				√				√							
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1																	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kepuren	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Kepuren	%	90	887.060 482.																
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.000.000 15	√															

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	INDIKATOR KINERJA Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	SATUAN Unit	TARGET KINERJA 5	ANGGARAN (Rp) .200.000	RENCANA PELAKSANAAN										KET.					
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ ormas	1	687.060 424.	√							√								
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1																	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terutih	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Terutih	%	90	295.888 821.																
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.895.000 15	√															
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	.700.000 53								√								
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ ormas	1	700.888 751.	√							√								

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Evaluasi Kelurahan	INDIKATOR KINERJA Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	SATUAN Laporan	TARGET KINERJA 1	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.					
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pabuaran	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Pabuaran	%	90	982.704 333.																		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.870.000 14	√																	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	.300.000 36		√																
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ ormas	1	812.704 282.	√		√				√						√					
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1																			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasuluhan	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Pasuluhan	%	90	637.060 396.																		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.000.000 15	√																	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Perencanaan Pembangunan di Desa	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.						
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	.700.000 53																			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ ormas	1	937.060 327.																			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1																				
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalsari	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Tegalsari	%	90	411.010 329.																			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.894.900 15																			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit	5	.700.000 53																			

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA terbangun	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ ormas	1	816.110 259.	√			√			√				√				
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1																
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pipitan	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Pipitan	%	90	457.060 507.															
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.000.000 15	√														
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	.120.000 45				√											
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ ormas	1	337.060 447.	√			√			√					√			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Pemberdayaan Kelurahan Lebakwangi	INDIKATOR KINERJA Pemberdayaan Kelurahan Lebakwangi	SATUAN %	TARGET KINERJA 90	ANGGARAN (Rp) 067.038	RENCANA PELAKSANAAN												KET.					
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	Lembaga	5	.865.000	15	√																
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	Unit	5	.280.000	53		√															
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat	pokmas/ ormas	1	922.038	290.	√		√				√						√				
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1																			
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terbina	lembaga		254.390.000																		
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Event yang diselenggarakan	event																				

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	INDIKATOR KINERJA Kualitas Pelaksana lembaga masyarakat	SATUAN org	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp) 390.000	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM		-																
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				.410.000	65															
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				65.410.000																

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KORDINASI KEPOLISIAN NEGARA DAN KETERTIBAN UMUM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA Capaian penangan k3	SATUAN %	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp) 11.065.000	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
			KECAMATAN	KECAMATAN																				
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Posko yang terfasilitasi	posko																		
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko																		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org																		
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Capaian Laporan pelanggaran PERDA	posko	80	.065.000	11															
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	jumlah laporan monitoring dan evaluasi penegakan K3	Laporan	1	.065.000	11	√			√			√				√				

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI Perencanaan, Penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org																		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Persentase Terselenggara nya Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		250.000 230.																
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	capaian penyelenggaraan event urusan pemerintahan umum	%	75	250.000 230.																
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah event PHBN yang diselenggarakan	org	200	17.920.000							√									

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.		
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah event PHBI yang diselenggarakan	org	1.650	168.250.000	√		√			√			√						
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	jumlah penyelenggaraan	Dok	1	44.080.000	√			√			√			√					

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN Pimpinan Kecamatan	INDIKATOR KINERJA raks forkopimcam	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET.				

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang Menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

3. Capaian Kinerja
4. Analisis Capaian Kinerja
5. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Walantaka.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Walantaka dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Walantaka Tahun 2023.

- a) Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kota Serang) 2023, Kecamatan Walantaka telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan.

TABEL 3.1
PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Nilai	82	79,09	96,45	sangat tinggi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat		Hasil evaluasi LKjIP	Nilai	67	69,40 (Nilai LHE menggunakan Tahun 2022)	103,58	sangat tinggi

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kecamatan							
			Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretaria tan	%	95	92,73	97,61	sangat tinggi
1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	95	81,57	85,86	sangat tinggi
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan	%	100	97,13	97,13	sangat tinggi
3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan	%	100	94,6	94,60	sangat tinggi
4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai Kecamatan	%	100	100	100,00	sangat tinggi
5			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	%	100	84,07	84,07	sangat tinggi
6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	90,44	90,44	sangat tinggi
7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	91,67	91,67	sangat tinggi
8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	73,1	73,10	tinggi

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			n Daerah	Daerah					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SOP/SP/KE-TENTUAN	%	95	93,10	98,00	sangat tinggi
9			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	85	85,00	100,00	sangat tinggi
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100,00	100,00	sangat tinggi
10			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	100	100,00	sangat tinggi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kategori kelurahan berkembang	%	60	60	100,00	sangat tinggi
11			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian Pemberdayaan Kelurahan	%	90	90	100	sangat tinggi
12			Pemberdayaan Lembaga Kemasya-	capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terbina	lembaga	1	1	100,00	sangat tinggi

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			katan Tingkat Kecamatan						
13			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	%	100	100	100	sangat tinggi
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan	%	80	80	100.00	sangat tinggi
13			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Capaian Laporan pelanggaran PERDA	%	80	80	100.00	sangat tinggi
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan	%	90	90	100.00	sangat tinggi
14			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	capaian penyelenggaraan event urusan pemerintahan umum	%	75	75	100.00	sangat tinggi

Berdasarkan Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada tabel tersebut diatas bahwa capaian kinerja Kecamatan Walantaka pada Tujuan Strategis Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka pada Indikator Kinerja Capaian mencapai 79,09 % dengan persentase 96,45% dan untuk Indikator Kinerja Hasil Evaluasi LKjIP mencapai 69.40 (B) dengan persentase capaian sebesar 103,58% melebihi dari target yang telah ditetapkan 67.00 (B) dan untuk Sasaran Program

dalam hal kinerja kecamatan sudah baik dikarenakan capaian dari program dan kegiatan yang ada memiliki persentase capaian 100 %

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Walantaka Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja Tahun ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA	CARA FORMULA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Nilai rata-rata dari aspek pencapaian, aspek kualitas dokumen dan aspek inovasi	Nilai	82	79,09	96,45	sangat tinggi
Hasil evaluasi LKjIP	Nilai Pelaporan kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat	Nilai	67	69,40	103,58	sangat tinggi

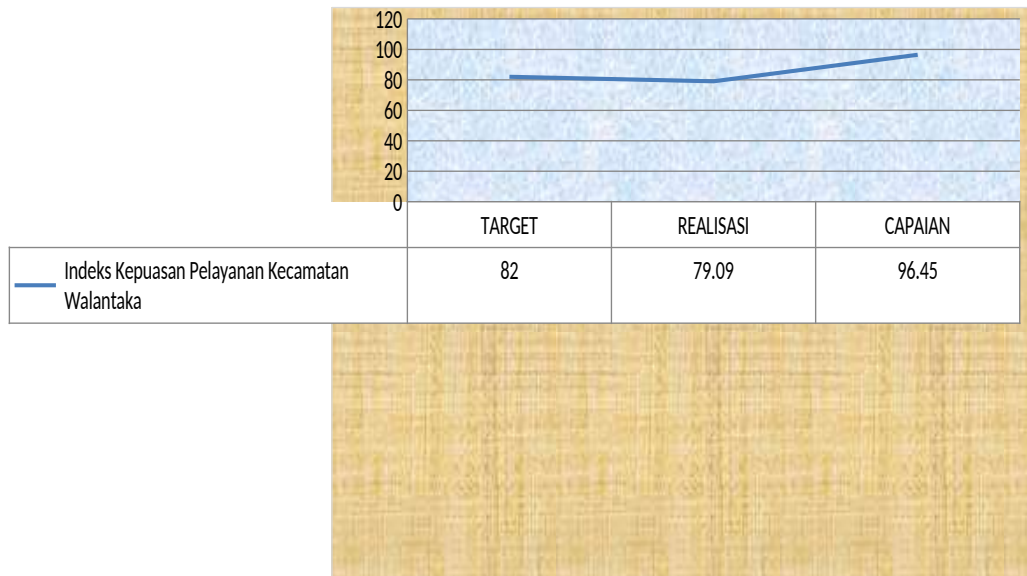
Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Walantaka memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka

Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka belum terrealisasi dari target yang ditetapkan selama tahun 2023 yaitu 82%, sedangkan realisasinya baru 79,09%, tetapi bila dilihat dari persentasenya sudah diangka 96,45% atau sudah sangat tinggi, seperti table dibawah ini :

Grafik 3.1

Tabel Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka Tahun 2023



Indeks kepuasan masyarakat di PATEN Walantaka sudah terkategori baik dengan indeks sebesar 79,09 pada triwulan keempat tahun 2023 atau terkategori baik dengan mutu pelayanan B atau memuaskan. Tercatat selama triwulan satu hingga triwulan keempat menunjukkan indeks yang konsisten dengan kategori memuaskan, meskipun pada triwulan kedua mengalami penurunan indeks dari 78,84 pada triwulan pertama menjadi 78,60. Pada triwulan ketiga dan keempat mengalami kenaikan dari 78,73 menjadi 79,09. Dengan menggunakan indeks unit PATEN Walantaka sebesar 79,09 sebagai threshold, maka teridentifikasi adanya permasalahan pada 5 unsur kompositnya, yaitu: waktu pelayanan, kompetensi petugas pelaksana, perilaku petugas pelaksana, maklumat pelayanan, serta sarana dan prasarana.

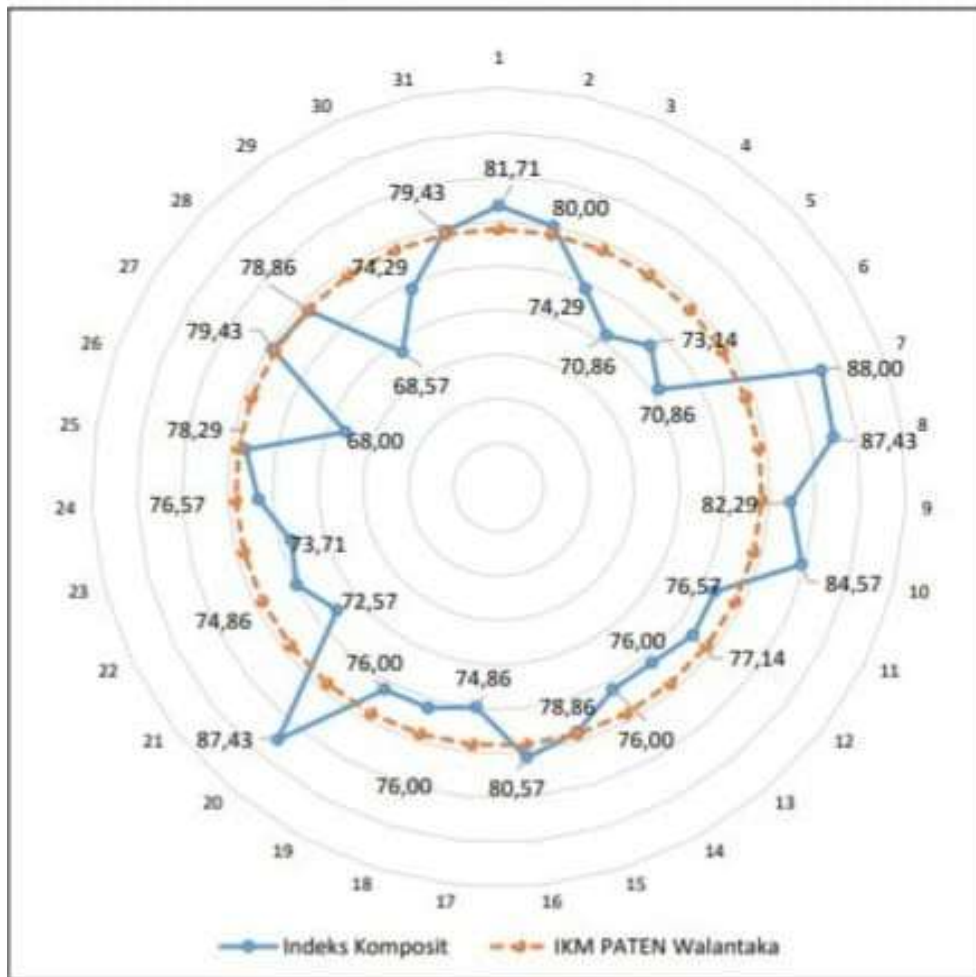
Permasalahan yang teridentifikasi pada indikator komposit dari unsur waktu pelayanan diantaranya adalah kurangnya ketepatan waktu buka layanan, waktu istirahat, waktu tutup pelayanan dan waktu tunggu pelayanan dengan mutu layanan C. Permasalahan lainnya adalah keterampilan, responsivitas dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan yang kurang memuaskan. Kemudian keberadaan maklumat pelayanan yang minim serta integritas terhadap maklumat yang rendah juga menjadi permasalahan. Pada unsur sarana dan prasarana, permasalahan yang ada pada indikator kompositnya adalah kebersihan lingkungan dan toilet yang kurang terjaga, inefektivitas larangan merokok, sarana dan prasarana afirmasi yang belum memadai dan minimnya ketersediaan rambu-rambu mitigasi.

IKM PATEN Walantaka Berdasar Indikator Komposit Tahun 2023

No	Indikator	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	Mutu	Keterangan
1	Kemudahan Persyaratan	80,84	80,57	81,48	81,71	B	Di atas rerata
2	Kemudahan Prosedur	80,58	80,71	79,13	80,00	B	Di atas rerata
3	Ketepatan Waktu Buka Pely	68,50	69,46	70,33	74,29	C	Di bawah rerata
4	Ketepatan Waktu Istirahat	86,93	87,89	88,76	70,86	C	Di bawah rerata
5	Ketepatan Waktu Tutup Pely	72,34	73,30	74,17	73,14	C	Di bawah rerata
6	Ketepatan Waktu Tunggu Pely	73,18	74,14	75,01	70,86	C	Di bawah rerata

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa pada triwulan keempat terdapat 16 dari 31 indikator berkualifikasi C dan 15 indikator berkualifikasi B. Dari 31 indikator tersebut, 21 indikator belum mencapai indeks unit PATEN Walantaka dan 10 indikator telah mencapai indeks unit PATEN Walantaka sebesar 79,09.

Grafik 3.2
Postur Pelayanan Publik di PATEN Walantaka

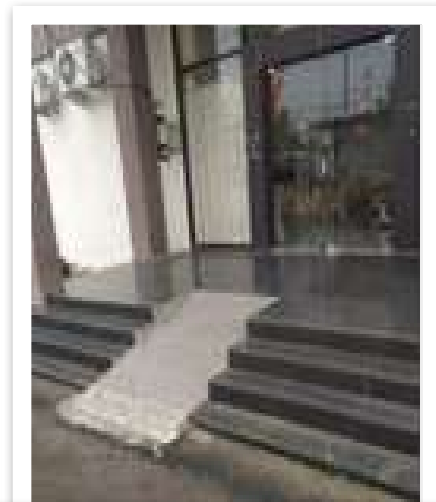


Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2023

Irregularitas bentuk kurve yang terbentuk dari indikator komposit sebagaimana tampak pada grafik di atas, juga dengan luasan kurve yang cenderung kurang optimum dan kurang seimbang antar indikatornya, mencerminkan postur pelayanan publik yang kurang ideal karena masih tampak diskrepansi kinerja antar indikatornya yang sangat nyata. Karenanya fokus perbaikan perlu diarahkan pada upaya meningkatkan sekaligus menyeimbangkan kinerja indikator-indikator kompositnya tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan postur pelayanan publik di atas perbaikan kinerja indikator-indikator komposit di PATEN Walantaka dapat difokuskan melalui upaya-upaya pada tiga unsur dengan indeks paling rendah yakni unsur waktu pelayanan dengan indeks sebesar 72,29; unsur maklumat pelayanan dengan indeks sebesar 76,00 serta unsur sarana dan prasarana dengan indeks sebesar 75,20. Adapun rencana aksi yang dapat dilakukan pada tiga unsur terendah tersebut adalah berikut:

1. Pada unsur waktu pelayanan, perlu melakukan briefing sebelum pelaksanaan kegiatan pelayanan untuk mengecek kesiapan petugas dan melakukan fungsi monitoring serta evaluasi untuk mencegah ketidakdisiplinan waktu pelayanan.
2. Pada unsur maklumat pelayanan, perlu melakukan design ulang maklumat pelayanan melalui media publikasi yang lebih efektif serta melakukan supervisi dan pembinaan agar petugas menjiwai setiap esensi.
3. Pada unsur sarana dan prasarana pelayanan, perlu mengoptimalkan kinerja petugas kebersihan serta membentuk petugas piket yang terjadwal secara rutin, efektivitas larangan merokok, menyediakan sarana dan prasarana afirmasi serta menyediakan rambu-rambu mitigasi bencana.



Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mengaktifkan masyarakat untuk mau berpartisipasi menjadi responden dalam mengisi survey kepuasan masyarakat secara online yang disediakan oleh BAPPEDA.
2. Telah dilakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan terhadap masyarakat yaitu Ruang Bermain Anak, Ruang Laktasi, fasilitas kursi roda untuk disabilitas, petunjuk parkir kendaraan dan titik kumpul bencana, toilet khusus masyarakat dan wastuffle di pintu masuk ruang pelayanan.
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendingin ruangan dan alat pemadam kebakaran untuk memfasilitasi ruang pelayanan PATEN yang sebelumnya belum tersedia.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam petugas pelayanan dalam melaksanakan pelayanan dan selalu berpartisipasi dalam program yang diselenggarakan oleh OPD terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pada tahun 2022 memberlakukan pelayanan pembuatan data kependudukan secara kolektif oleh Operator SIAK yang ada di Kecamatan. Sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh ke kantor DISDUKCAPIL secara langsung akan tetapi cukup ke kecamatan.

2. Hasil Evaluasi LKjIP

Evaluasi dokumen LKjIP dilaksanakan pada awal tahun 2023 yang merupakan laporan capaian kinerja tahun 2022. Evaluasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Serang menerangkan bahwa Kecamatan Walantaka mendapatkan skor 69,40 dengan predikat B = Baik dari skor yang ditargetkan sebesar 67. Sehingga persentase capaian kerjanya ada pada angka 103,58%. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan skor 66,26, LKjIP tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dengan skor 69,40 sehingga rata-rata kenaikannya adalah 47,3%.

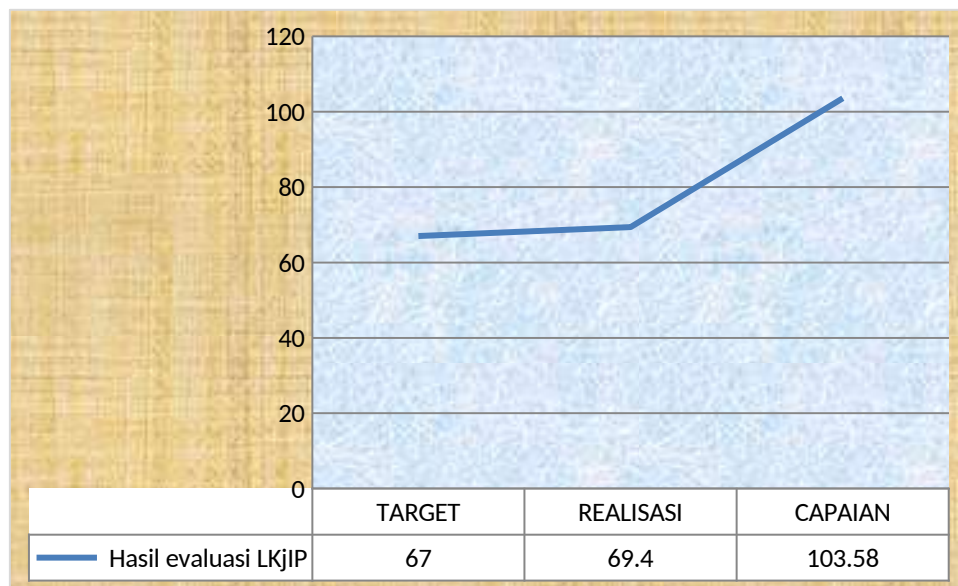
Meningkatnya skor hasil reviu Inspektorat merupakan bukti nyata kinerja OPD kecamatan Walantaka dalam berupaya untuk mensukseskan visi misi Kepala Daerah. Hal ini dicapai tidak lepas dari koordinasi dan konsultasi dengan

OPD teknis dalam hal ini Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang serta Inspektorat selaku tim yang mereviu dokumen LKjIP Kecamatan Walantaka.

Sesuai hasil rekomendasi dari tim riviui dokumen LKjIP Kecamatan Walantaka berikut adalah perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan :

1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi.
2. Membuat SOP yang baku mekanisme pengumpulan data capaian kinerja dalam penyusunan LKjIP.
3. Hasil Pengukuran Kinerja dijadikan dasar pemberian reward dan punishment.
4. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaporan kinerja.
5. Pencapaian target kinerja sasaran dalam rencana kerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran.
6. Menyajikan informasi terkait penyebab, hambatan, permasalahan atas keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan dalam laporan kinerja.

Grafik 3.3
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2023



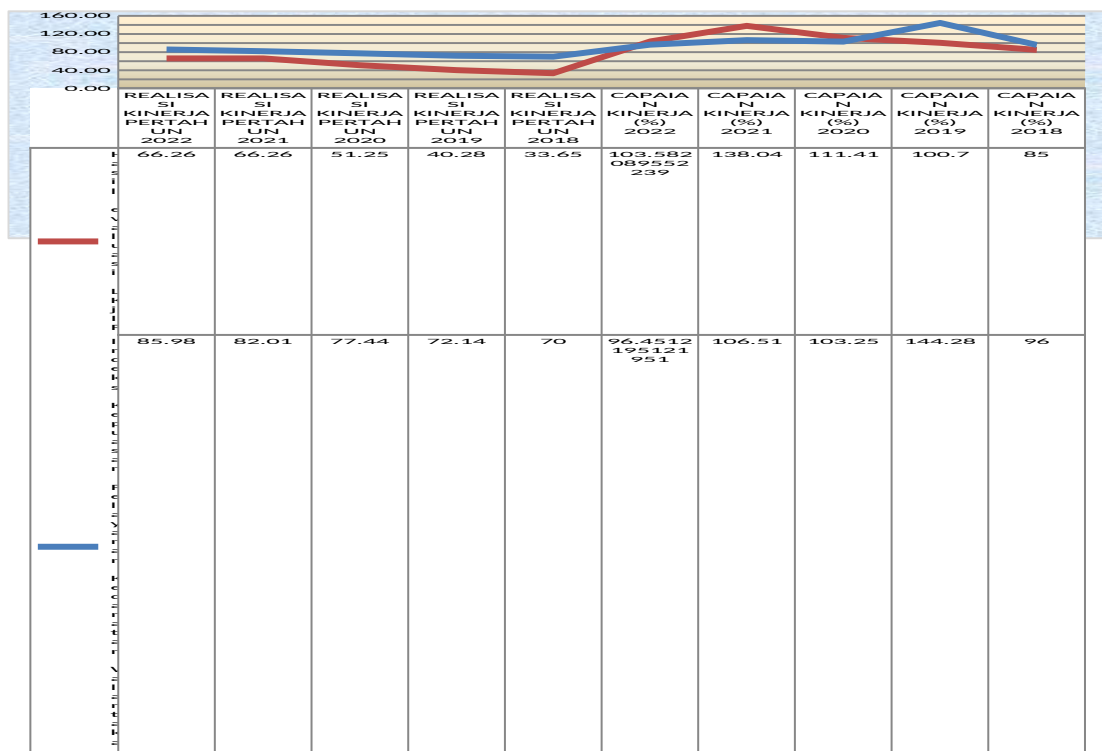
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2018 s.d 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023 (N)	REALISASI KINERJA PERTAHUN					CAPAIAN KINERJA (%)				
			2022 (N-1)	2021 (N-2)	2020 (N-3)	2019 (N-4)	2018 (N-5)	2022 (N-1)	2021 (N-2)	2020 (N-3)	2019 (N-4)	2018 (N-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Nilai	79,09	85,98	82,01	77,44	72,14	70,00	96,45	106,51	103,25	144,28	96,00
Hasil evaluasi LKJIP	Nilai	69,40	66,26	66,26	51,25	40,28	33,65	103,58	138,04	111,41	100,70	85,00

GRAFIK 3.4

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2018 s.d 2022**



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Walantaka mengalami peningkatan dari tahun dasar Renstra 2018-2023 hingga capaian tahun 2023. Hal ini dikarenakan Kecamatan Walantaka terus berupaya

dalam mewujudkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan kemasyarakatan yang baik. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Walantaka pada tahun 2023 :

1. Komitmen pimpinan untuk melakukan reformasi birokrasi pada aspek kepegawaian untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Komitmen pimpinan dalam menciptakan masyarakat yang bersanitasi total berbasis masyarakat dengan menggalakan inovasi WATUJAGA.
3. Sumber daya yang mulai memadai dari mulai sarana prasarana hingga sumber daya manusia dalam melakukan perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran kecamatan.
4. Gerakan pemberdayaan kemasyarakatan dengan melibatkan stakeholder atau organisasi masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan baik secara infrastruktur lingkungan maupun lingkungan kesehatan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN WALANTAKA
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

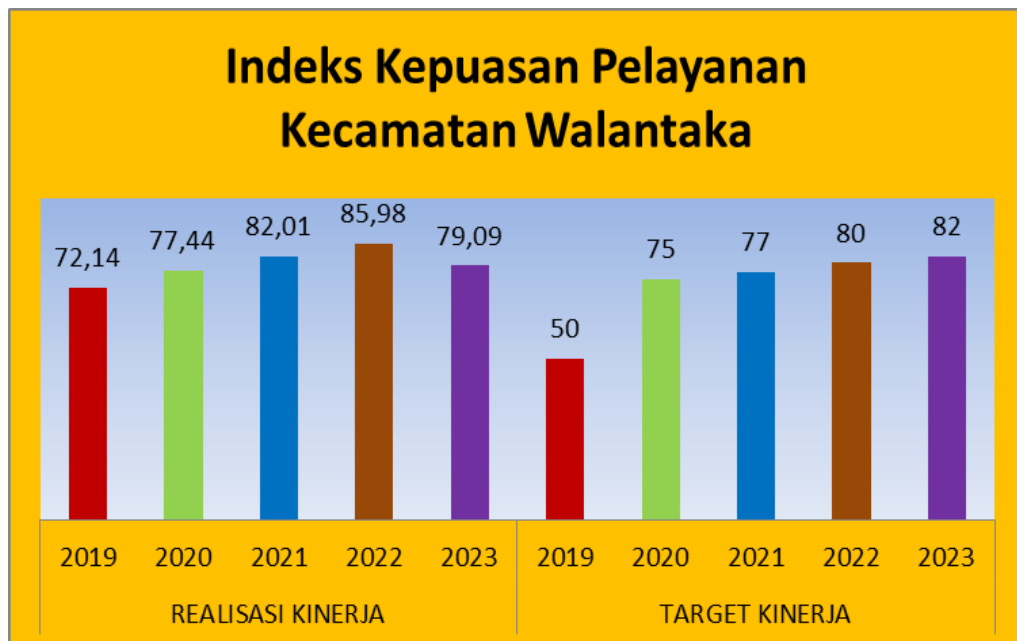
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJM	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA (%)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJM
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Nilai	82,00	50	75	77	80	82	72,14	77,44	82,01	85,98	79,09	144,28	103,25	106,51	107,48	96,45	96,45
Hasil evaluasi LKjIP	Nilai	67,00	40	46	48	50	67	40,28	51,25	66,26	66,26	69,40	100,70	111,41	138,04	132,52	103,58	103,58

Pada Pengukuran Kinerja ini dilakukan juga pengukuran pada kinerja kegiatan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian pada tahun dasar hingga tahun 2023 agar dapat diketahui capaian kinerja kegiatan pada masing-masing tahun dalam

rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada misi perangkat daerah. Dan untuk mengetahui kemajuan kinerja kecamatan Walantaka tahun 2023 atas perbandingan kinerja kecamatan dengan kondisi akhir RENSTRA Kecamatan. Selanjutnya perbandingan capaian kinerja hingga tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir Perubahan Kedua RENSTRA Kecamatan Walantaka adalah sebagai berikut :

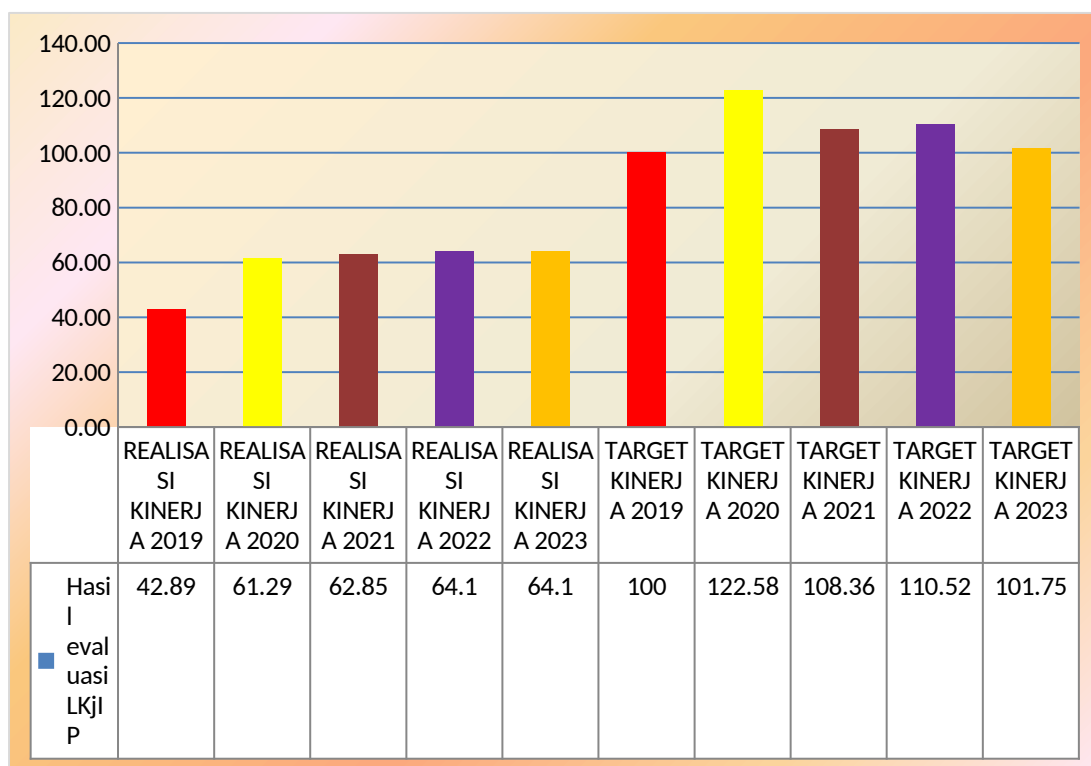
- a. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka belum mencapai target yang direncanakan pada kondisi akhir Renstra tahun 2023 yaitu target capaian dengan nilai 82 pada tahun 2023 dengan nilai 79,09 sehingga persentasinya mencapai 96,45%.

GRAFIK 3.5
INDEKS KEPUASAN PELAYANAN
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2023



- b. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditarget dengan nilai 69,40 pada tahun akhir Renstra 2023, sedangkan LKjIP tahun 2023 telah mencapai nilai 69,40 sehingga target persentasinya mencapai 98,90%.

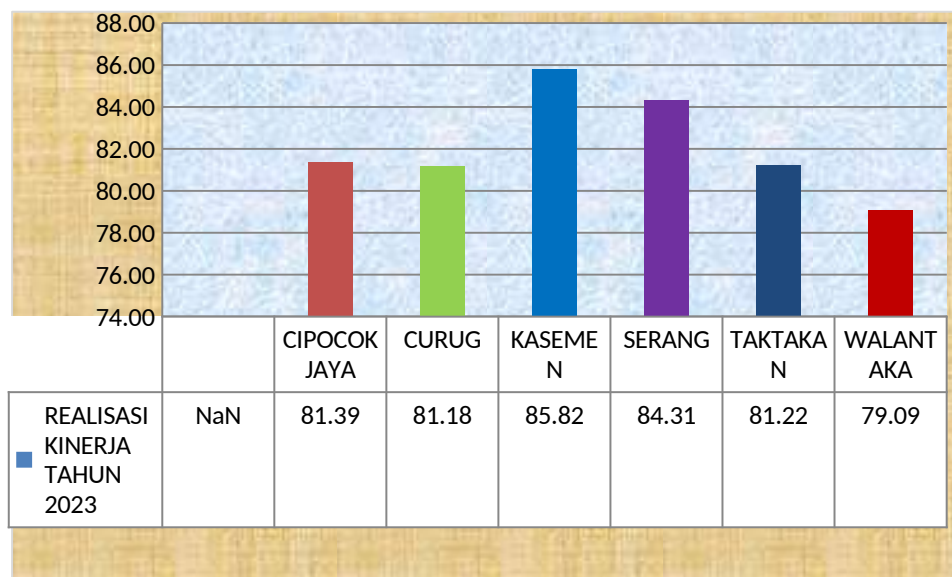
GRAFIK 3.6
HASIL EVALUASI LKjIP KECAMATAN WALANTAKA
TAHUN 2023



d. Membandingkan realisasi Kinerja IKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang tersebar di 6 (*enam*) kecamatan di wilayah Kota Serang. Capaian kinerja IKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Wilayah Kota Serang, terlihat pada grafik di bawah ini :

GRAFIK 3.7
CAPAIAN KINERJA IKM PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAHUN 2023



Indeks kepuasan masyarakat di PATEN untuk seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kota Serang dapat terlihat bahwa untuk capaian PATEN Kecamatan Walantaka pada tahun 2023 termasuk kategori terendah dibandingkan 5 Kecamatan lainnya. Kecamatan Walantaka dengan indeks capaian 79,09 pada tahun 2023. Untuk Kecamatan yang tertinggi capaiannya ada pada Kecamatan Kasemen. Walaupun Kecamatan Walantaka sudah terkategori baik dengan indeks sebesar 79,09 pada triwulan keempat tahun 2023 atau terkategori baik dengan mutu pelayanan B atau memuaskan. Tercatat selama triwulan satu hingga triwulan keempat menunjukkan indeks yang konsisten dengan kategori memuaskan, meskipun pada triwulan kedua mengalami penurunan indeks dari 78,84 pada triwulan pertama menjadi 78,60. Pada triwulan ketiga dan keempat mengalami kenaikan dari 78,73 menjadi 79,09.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Walantaka sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka diperoleh angka 79,09. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Walantaka untuk Tahun 2023 dikategorikan berhasil mencapai target.

Sedangkan untuk indikator Kinerja Utama Hasil evaluasi LKjIP Kecamatan Walantaka ditargetkan pada tahun 2023 adalah 67% sedangkan diperoleh angka 69,40%. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Walantaka untuk Tahun 2023 dikategorikan berhasil melampaui target.

Keberhasilan dalam pelaksanaan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Faktor internal

a. Ketersediaan anggaran dan sarana dan prasarana

Program kerja yang direncanakan dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya walaupun perlu peningkatan kualitas perencanaan menyesuaikan dengan standarisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Serang.

b. Dedikasi PNS

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Perangkat Daerah, khususnya pada Kecamatan Walantaka menjadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada. Misalkan untuk pelayanan, ada pendampingan dalam pengisian/proses formulir. Dalam hal penurunan jumlah pelanggaran perda didukung oleh tingginya frekuensi patroli, dukungan OPD dan instansi organik, serta dilakukan penertiban keliling secara rutin oleh Babinsa dan Babinkamtibmas.

c. Monitoring

Monitoring merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

a. Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di Kecamatan Walantaka maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Membangun sinergi komunikasi yang baik, sehingga tercipta partisipasi dari masyarakat dan stakeholder yang terlibat. Ada anggaran dari pemerintah untuk perbaikan kondisi ekonomi, lingkungan kesehatan warga masyarakat sehingga mendorong adanya swadaya masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perkembangan pembangunan wilayah, dalam hal ini perkembangan pariwisata dan pengembangan keunggulan lokal. Juga dalam hal pelayanan kependudukan, ada partisipasi para kader, baik kader posyandu dan kader PKK.

Dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Tahun 2023, faktor penghambat keberhasilan adalah :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, ketaatan masyarakat terhadap kewajiban serta sangsi, kondisi ekonomi dan pelanggaran yang berulang. Padahal tidak ada kewenangan untuk eksekusi, eksekusi hanya bisa dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang.
2. Pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan, alur pelayanan yang ada di kelurahan masih rendah sehingga masih ada masyarakat yang enggan datang sendiri ke kelurahan dan mewakilkan. Persyaratan layanan yang dibawa

warga kurang lengkap, keterbatasan waktu layanan online dengan Dindukcapil dan masyarakat belum semua dapat mengakses secara online.

Untuk solusi yang telah dilakukan dalam mengatasi kegagalan adalah :

1. Menambah frekuensi patroli, dukungan OPD dan instansi organik, serta dilakukan penertiban keliling secara rutin oleh BKO, Babinsa dan Babinkamtibmas.
2. Memaksimalkan Koordinasi dengan stakeholder berjalan dengan baik. Koordinasi dengan Forkompincam dengan baik dan fasilitas dari pemerintah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan mengoptimalkan sarana digital dalam melakukan koordinasi secara efektif dan efisien dan informasi lebih cepat tersampaikan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

f. Analisis atas efiseinsi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana yang didukung dari anggaran. Untuk sumber daya manusia, memang memiliki keterbatasan tidak sesuai dengan analisis jabatan. Tidak memenuhi dalam jumlahnya. Akan tetapi, tetap memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk anggaran, efisiensinya hanya untuk belanja modal sedangkan untuk untuk barang dan jasa yang menunjang sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di kantor. Akan tetapi dengan jumlah minimal dari target yang dibutuhkan. Begitu juga untuk sarana dan prasarana di wilayah, bertambah dengan target minimal yang di butuhkan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Untuk memaksimalkan manajemen potensi sumber daya wilayah dengan cara membangun sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder yang ada.

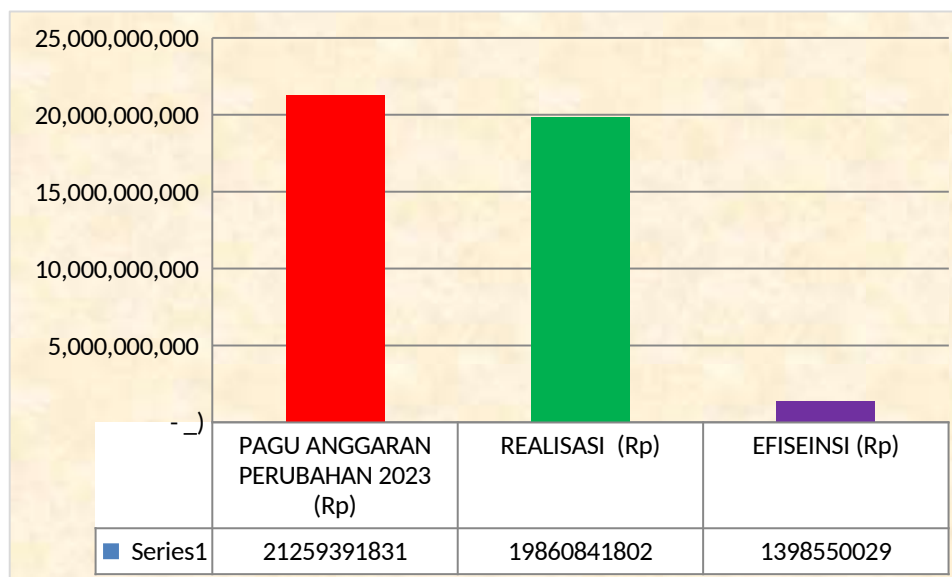
TABEL 3.5

PENCAPAIAN TINGKAT EFISIENSI REALISASI ANGGARAN DENGAN KINERJA TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KINERJA		ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI	STATUS
						KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI Rp.	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	%	82	21.259.391.831	79,09	96,45	19.860.841.802	93,42	3,14	efisien
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan		Hasil evaluasi LKjIP	Nilai	67	21.259.391.831	69,40	103,58	19.860.841.802		9,81	efisien
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	90	14.226.337.661	90	100,00	13.191.982.465	92,73	7,27	efisien
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SOP/SP/KETENTUAN	%	95	169.033.000	95	100,00	157.361.500	93,10	6,90	efisien

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KINERJA		ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI	STATUS
						KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI Rp.	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kategori kelurahan berkembang	%	60	6.622.706.170	60	100,00	6.316.881.837	95,38	4,62	efisien
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian penanganan k3	%	70	11.065.000	70	100,00	5.760.000	52,06	47,94	efisien
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	85	230.250.000	85	100,00	188.856.000	82,02	17,98	efisien

GRAFIK 3.8
PENCAPAIAN TINGKAT EFESIENSI REALISASI ANGGARAN
DENGAN KINERJA TAHUN 2023



Dari grafik pencapaian tingkat efisiensi realisasi anggaran dengan kinerja Kecamatan Walantaka tahun 2023 menunjukkan tingkat efisiensi sebanyak Rp. 1.398.550.029,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribuh Nol Dua Puluh Sembilan Rupiah), atau dalam persentase sebesar 6,58% dari pagu perubahan Tahun Anggaran 2023.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

TABEL 3.6
Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian
Indikator Kinerja Kecamatan Walantaka tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka				Nilai	82	79,09	96,45	sangat tinggi
2	Hasil evaluasi LKJIP				Nilai	67	69,40	103,58	sangat tinggi
		Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	95,00	92,73	97,61	sangat tinggi

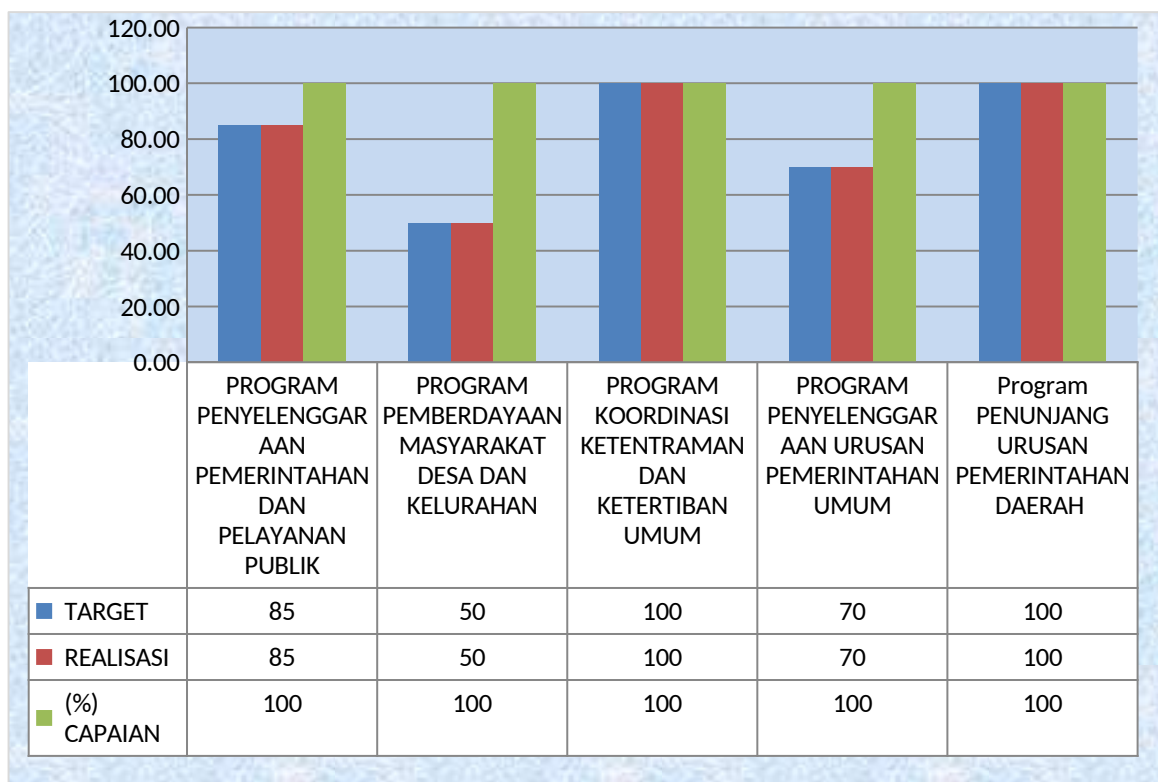
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dok	11	11	100,00	sangat tinggi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan	Dok	14	14	100,00	sangat tinggi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan	Dok	2	2	100,00	sangat tinggi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai Kecamatan	%	100	100	100,00	sangat tinggi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	12	12	100,00	sangat tinggi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	7	7	100,00	sangat tinggi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	12	12	100,00	sangat tinggi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	30	30	100,00	sangat tinggi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SOP/SP/KETENTUAN	%	95,00	93,10	98,00	sangat tinggi
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	85	85	100,00	sangat tinggi
			Penyelenggara	Capaian	%	100	100	100,00	sangat tinggi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			aan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	100	100,00	sangat tinggi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase kategori kelurahan berkembang	%	60	60	100,00	sangat tinggi
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Walantaka	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Walantaka	%	90	90	100,00	sangat tinggi
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terbina	lembaga	1	1	100,00	sangat tinggi
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	Keluarga	5	5	100,00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian penanganan k3	%	80	80	100,00	sangat tinggi
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Capaian Laporan pelanggaran PERDA	%	80	80	100,00	sangat tinggi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	90	90	100,00	sangat tinggi
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	capaian penyelenggaraan event urusan	%	75	75	100,00	sangat tinggi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	pemerintahan umum					

Grafik 3.9

Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Walantaka tahun 2023



Dari grafik dan table diatas dapat terlihat bahwa terdapat 3 program yang telah mencapai target realisasi di Kecamatan Walantaka pada Tahun 2023, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban UMum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang masing telah terrealisasi 100%. Dan untuk 2 program lainnya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terrealisasi sebesar 98% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terrealisasi sebesar 97,61%.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan penunjang kesekretariatan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Program ini terdiri dari kegiatan perencanaan pelaporan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, pemeliharaan dan pengadaan barang milik daerah. Secara umum capaian indikator kinerja program ini adalah 97,61%.

Output sub kegiatan yang tercapai pada program ini sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	CAPAI AN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	dokumen	14	Renstra Perubahan, PK Murni, PK Perubahan, RENJA Murni, Renja Perubahan, RKA Murni, RKA Pergeseran, DPA Murni, DPA Pergeseran, Dok Penilaian Risiko, Renja RB, LKjIP, LPPD, LKPJ
2	Administrasi Keuangan	dokumen laporan keuangan	dokumen	3	Laporan Keuangan Unaudited, Laporan Keuangan Audited, Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Bulanan
3	Administrasi Kepegawaian	peserta Bimtek Kepegawaian	orang	50	Seluruh Pegawai yang ada di wilayah Kecamatan Walantaka
4	Administrasi BMD	Laporan BMD	dokumen	2	Belanja Modal dan Persediaan Barang Pakai Habis Kecamatan dan 14 Kelurahan
5	Administrasi Umum	pelayanan kesekretariatan	bulan	12	Surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar
6	Pemeliharaan BMD	kendaraan yang dipelihara	unit	12	kendaraan roda dua dan kendaraan roda 4 di kecamatan dan 14 kelurahan
7	Pengadaan BMD	gedung yang dibangun	unit	2	Pagar dan parkir Kantor Kecamatan

Keberhasilan : Tersusunnya dokumen yang bahkan tidak termasuk ke dalam target kegiatan pada DPA atau tidak teranggarkan seperti Dokumen Penilaian Risiko dan Dokumen Reformasi Birokrasi

Hambatan : Beban kerja yang melebihi kapasitas SDM eselon IV untuk mengelola kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan bisa di lihat dari capaian dokumen yang mencapai 17 dokumen dalam satu tahun anggaran

Saran : Menyampaikan usulan kepada pimpinan untuk melakukan pemisahan tupoksi antara Kasubag Keuangan dan PEP.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari dua kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai media untuk menunjang kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Capaian indikator kinerja program ini adalah persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai sop/sp/ketentuan sebesar 95% dengan serapan anggaran 98%. Output subkegiatan yang termasuk dalam program ini adalah dokumen musrenbang, partisipasi dalam lomba kelurahan dan distribusi SPPT PBB kepada Wajib Pajak yang memiliki tanah dan bangunan di Wilayah Kecamatan Walantaka.

- Keberhasilan : Kecamatan Walantaka mendapatkan reward dari Pemerintah Kota sebagai kecamatan dengan realisasi PBB tertinggi pada tahun 2023
- Hambatan : Kurangnya pemahaman dan motivasi bagi aparatur kelurahan dalam mengikuti ajang lomba kelurahan
- Saran : Memberikan reward kepada kelurahan yang berprestasi

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini merupakan penunjang dalam rangka memberdayakan perempuan dan masyarakat di Lingkungan Kecamatan Walantaka dengan indikator kinerja Capaian Kelurahan yang memenuhi standard kelurahan (berkembang). Formulasi perhitungan capaian berdasarkan hasil Laporan Data Evaluasi Perkembangan Kelurahan tahun 2023 melalui aplikasi online milik Kemendagri dengan link <http://epdeskel.kemendagri.go.id>. Dari 14 (empat belas) kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Walantaka.

Tabel 3.7
Hasil Laporan EPDESKEKEL tahun 2022

No	Nama Kelurahan	Bid. Pemerintahan	Bid. Kewilayahan	Bid. Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan
1	Walantaka	92	56	167	315	Berkembang
2	Cigoong	56	73	159	288	Berkembang

No	Nama Kelurahan	Bid. Pemerintahan	Bid. Kewilayahan	Bid. Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan
3	Nyapah	103	71	172	346	Berkembang
4	Pangampelan	57	59	169	285	Berkembang
5	Kiara	110	73	172	355	Cepat Berkembang
6	Pager Agung	113	91	180	384	Cepat Berkembang
7	Kalodran	92	49	157	298	Berkembang
8	Kepuren	114	77	185	376	Cepat Berkembang
9	Teritih	108	69	175	352	Cepat Berkembang
10	Pabuaran	116	90	184	390	Cepat Berkembang
11	Pasuluhan	107	85	165	357	Cepat Berkembang
12	Tegalsari	111	67	159	337	Berkembang
13	Pipitan	111	78	183	372	Cepat Berkembang
14	Lebakwangi	106	62	193	361	Cepat Berkembang

Kelurahan Berkembang berjumlah 5 kelurahan yaitu :

1. Walantaka
2. Cigoong
3. Nyapah
4. Pangampelan
5. Kalodran

Kelurahan Cepat Berkembang 9 kelurahan yaitu :

1. Kiara
2. Pager Agung
3. Kepuren
4. Teritih
5. Pabuaran
6. Pasuluhan
7. Tegalsari
8. Pipitan
9. Lebakwangi

Sehingga hitungan formulasi capaian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Jumlah Kelurahan dengan status cepat berkembang

x100%

Jumlah seluruh Kelurahan

Dengan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{8}{14} \times 100\% \\ &= 57,14\% \end{aligned}$$

Capaian kelurahan dengan status cepat berkembang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 50% menjadi 57,14%.

Selain keberhasilan dalam capaian status Kelurahan Cepat Berkembang, pada program ini Kecamatan Walantaka berhasil meraih capaian indikator lainnya yaitu :

- a. Juara Lingkungan paling Hijau dan Aman Tingkat Kota Serang di raih oleh Kel. Cigoong, Kelurahan Pipitan dan Kelurahan Pageragung

Untuk program STBM tahun 2023 dilaksanakan di 28 titik lanjutan dari tahun sebelumnya, yaitu di Kelurahan Pageragung.



b. Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Tabel 3.8
Lokus Sarpras Kelurahan

No	Nama Kelurahan	Spek Pekerjaan	Lokasi	Realisasi	jumlah anggaran
1	Walantaka	Drainase	Ling.Tanjong RT. 05/02	18.720.000	18.720.000
2	Walantaka	Pavling Blok	Link. Pesanggrahan 07/03	25.800.000	25.800.000
3	Teritih	Paving Blok	Link. Kubang Semar Rt. 03/04	51.300.000	51.300.000
4	Pipitan	Drainase	Rt. 12 Rw.03	40.230.000	40.230.000
5	Tegal Sari	Paving Blok	Rw. 03 Kp. Tamiang	51.300.000	51.300.000
6	Pangampelan	Drainase	Link. Cirogol Rw. 02	33.600.000	-
7	Pengampelan	Paving Blok	Link. Jelalalng Rw. 4	15.000.000	15.000.000
8	Pasuluhan	Paving Blok	Link. Bojonghonje 07/03	51.300.000	51.300.000
9	Pageragung	Drainase	Link. Sadik Rt. 15/04 dan Link. Kerami Rw. 03	48.000.000	48.000.000
10	Pabuaran	Paving Blok	Link. Ciwuni Rt. 004/001	33.900.000	33.900.000
11	Nyapah	Paving Blok	Link. Nyapah Inpres Rt. 003/002	50.100.000	50.100.000
12	Lebak wangi	Drainase	Link. Katepeng Rt. 003/002	24.000.000	24.000.000
13	Lebak wangi	TPT	Link. Cibonteng Rt. 001	24.000.000	24.000.000
14	Kiara	Paving Blok	Link. Kiara Rt. 05/01 dan Kp. Prisen Rt. 01/03	48.900.000	48.900.000
15	Kepuren	Drainase	Link. Penagkan Rt. 002	40.800.000	40.800.000
16	Kalodran	Paving Blok	Link. Kalodran Rt. 001/001	41.100.000	41.100.000
17	Cigoong	Paving Blok	Link. Cirungge Rw. 4	45.900.000	45.900.000
JUMLAH				644.520.000	644.520.000

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi Sarpras pada Kecamatan Walantaka pada Tahun 2023 sudah mencapai 100%

beberapa Dokumentasi terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana antara lain :



4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini koordinasi dengan aparat teknis dalam penegakan PERDA dilingkungan Kecamatan dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan APH baik tingkat kecamatan maupun tingkat Kota terkait penegakan PERDA dan undang-undang yang menyangkut ketertiban dan ketentraman masyarakat serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Turunan dari Program ini yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terdiri dari 3 subkegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan PHBI dan PHBN tingkat kecamatan sebagai partisipan dalam PHBI PHBN

tingkat kota. Serta untuk fasilitasi Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Pada pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam yaitu event MTQ tingkat Kota Serang, Kecamatan Walantaka meraih juara ke 4 sedangkan pada event Panjang Mulud meraih juara ke 3.



5.1.01 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Walantaka Tahun Anggaran 2023 memuat lima program dan 140 (seratus empat puluh) kegiatan serta 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) subkegiatan dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut :

1. Anggaran Murni : Rp. 20.856.462.894,-
2. Rasionalisasi anggaran : Rp. 1.398.550.029,-
3. Anggaran Perubahan : Rp. 21.259.391.831,-
4. Realisasi anggaran Belanja total sebesar Rp. 19.860.841.802,- atau 93,42%
5. Beberapa point penting pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

TABEL 3.9
REALISASI PROGRAM DAN SUB KEGIATAN
KECATAMA WALANTAKA TAHUN 2023

No	URAIAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
-	honor masyarakat dengan anggaran Rp. 4.582.200.000,-	Realisasi 99,6% sebesar Rp. 4.564.800.000,-
-	untuk KRLA Rp 433.499.020	Realisasi Rp 377.817.687 14 kelurahan
-	untuk pendampingan pemberian asupan gizi bagi balita gizi buruk dan stunting per kelurahan Rp 331.750.000	Realisasi 54,5% Rp 181.125.000
-	untuk infrastruktur kelurahan di swakelola oleh POKMAS Rp 698.960.000 terbagi di 14 kelurahan dengan 14 lokus	Realisasi 94,1% Rp 658.140.000 14 kelurahan
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
-	Koordinasi penegakan PERDA Rp 11.065.000	Realisasi 52% sebesar Rp 5.760.000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
-	Penyelenggaraan PHBI, PHBN dan kegiatan forkopimcam dengan total pagu sebesar Rp 230.250.000,-	Realisasi 82% Rp 188.856.000,-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan, dan kelurahan, pendistribusian PBB dan Lomba Kelurahan dengan total pagu program sebesar	Realisasi 96,1% Rp 358.489.050-

No	URAIAN	KETERANGAN
	Rp 373.122.150,-	

TABEL 3.10
PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2023

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan		21.259.391.83 1	19.860.841.802	93,42	
			Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	14.226.337.66 1	13.191.982.465	92,73	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.032.250	187.631.000	81,57	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.094.393.30 2	10.775.946.891	97,13	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.457.000	52.464.000	94,60	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.400.000	14.400.000	100,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.040.909	370.777.678	84,07	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	569.358.000	182.310.900	32,02	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.490.404.200	1.366.312.696	91,67	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	331.252.000	242.139.300	73,10	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8
			Urusan Pemerintahan Daerah				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	169.033.000	157.361.500	93,10	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72.158.000	70.496.500	97,70	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11.510.000	1.500.000	13,03	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.365.000	85.365.000	100,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.622.706.170	6.316.881.837	95,38	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.302.906.170	5.999.951.837	95,19	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	254.390.000	251.520.000	98,87	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	65.410.000	65.410.000	100,00	
			PROGRAM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.065.000	5.760.000	52,06	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.065.000	5.760.000	52,06	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	230.250.000	188.856.000	82,02	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	230.250.000	188.856.000	82,02	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8
			Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				

5.1.02 Daftar Penghargaan

1. Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan Tingkat Kota Serang.



2. Juara ke. 2 Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi Banten.



3. Juara Pertama Lingkungan Terinovatif dan Aman pada Lomba Resik Lan Aman Tingkat Kota Serang.



4. Juara Pertama Katagori Kecamatan Dengan PenagihanTerbanyak PBB P2-Tahun 2023.



BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka kami terus berupaya dalam meningkatkan nilai evaluasi LKjIP dengan direkomendasikan oleh tim Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kota Serang Tahun 2022 untuk Kecamatan Walantaka, sebagai berikut :

- a) Menyempurnakan dokumen rencana aksi kinerja pada dokumen laporan Kinerja dengan melengkapi analisis atau upaya yang dapat dilakukan apabila terdapat deviasi capaian kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semesteran);
- b) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupan indikator SMART dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- c) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan Critical Sukses Faktor (CSF)/factor penentu kesuksesan dalam mencapai tujuan dan dan sasaran organisasi.
- d) Membuat kebijakan/Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja dan realisasi beserta rencana aksinya, sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaiannya dan efektivitas strategi yang digunakan;
- f) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar menggunakan teknologi informasi (aplikasi) agar lebih efektif, efisien dan akurat;
- g) Menerapkan kebijakan reward dan punishment dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu;

- h) Pemanfaatan informasi kinerja agar digunakan dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan peningkatan kinerja;
- i) Menyempurnakan informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan didukung oleh data yang valid, sumber datanya jelas, dan dapat diverifikasi sesuai dengan rumsuan perhitungannya;
- j) Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja yaitu dengan menjelaskan analisis capaian kinerja berupa faktor keberhasilan atau kegagalan serta langkah dan upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam penyempurnaan kinerja serta menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan menyajikan informasi terkait perubahan budaya kerja organisasi;
- k) Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- l) Menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya;
- m) Secara aktif melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dapat dijadikan dasar pemberian reward dan punishment di internal Perangkat Daerah.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Walantaka dalam rangka rekomendasi dari AKIP Inpektorat tersebut adalah :

- a) Telah dicantumkan RENAksi TA.2023 disertai Upaya dan Kendalanya yang telah dicapai selama Tahun 2022 dengan penanggungjawabnya dilaksanakan oleh Kasubag PEP dan Keuangan, sesuai eviden yang dilampirkan.
 - ✓ Link Eviden Lama
https://drive.google.com/file/d/1nh2c58nRE8wo4E406D0N1VPXeuMS6YBk/view?usp=drive_link
 - ✓ Link Eviden Baru
<https://drive.google.com/file/d/16WMxYM3zahlpGlymwmb5Lu0hon64YSXm/view?usp=sharing>
- b) Telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan Renstra yang memuat komponen visi, misi, tujuan, sasaran, strategi (kebijakan dan program). Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan disertai target keberhasilannya. Sasaran telah dirinci dalam sasaran tahunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan telah memuat indikator kinerja sasaran. (Renstra Perubahan

kedua 2019-2023) yang memuat tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupan indikator SMART dan juga IKU sesuai dengan SMART dapat terukur dari target yang akan dicapai sampai dengan realisasi dan persentase capaiannya dan menjelaskan penanggung jawab dari masing-masing Indikator Kinerjanya.

✓ Link Eviden Lama

<https://drive.google.com/file/d/1DiH0jRvvE8jxUOrn9aGck5NSGlXUfhS8/view?usp=sharing>

✓ Link Eviden Baru (Renstra Perubahan ke. 2)

https://drive.google.com/file/d/1r6kL_5QkIKdCJuUEchVhQ83qW145ZWUN/view?usp=sharing

c) Telah dilakukan perbaikan Cascading sesuai dari perjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi sampai ke level operasional. Terlampir Cascading sesuai perjenjangan dari Tingkat RPJMD sampai dengan Indikator sub kegiatan.

✓ Link Eviden Lama

<https://drive.google.com/file/d/1AE2Xd1c9O4jbU4ggozQYAOxgZPSiSoi/view?usp=sharing>

✓ Link Eviden Baru

https://drive.google.com/file/d/1pIIdC_-VWLI_NsZdLX8DwUlue7WVRFbr/view?usp=sharing

d) Telah dicantumkan SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. telah terlampir SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

✓ Link Eviden Lama

<https://drive.google.com/file/d/1pxzT4OVCSazOHypZUsS9C3aonu7uFB4C/view?usp=sharing>

✓ Link Eviden Baru

<https://drive.google.com/file/d/1LwdIkSF68RaF14SFGx62L146gb9lABlo/view?usp=sharing>

e) Telah dilakukan perbaikan pelaporan EVLAP pada Triwulan ke.4. Terlampir Laporan EVLAP TW.IV TAHUN 2022 dan EVLAP TW.IV TAHUN 2023.

✓ Link Eviden Lama

https://drive.google.com/file/d/1Z2_f1fG0bTxN2hYWJl2YvKY_bDuXS786/view?usp=sharing

✓ Link Eviden Baru

<https://drive.google.com/file/d/11rpRnYffxj31rJNRBdcbrYkVkhzqslws/view?usp=sharing>

f) Screenshot aplikasi SIMAK dan mencantumkan history/ riwayat penginputan aplikasi SIMAK.

✓ Link Eviden Lama

<https://drive.google.com/file/d/1MFhqng538BpA5UsLVRZBcR7721Yql6Ez/view?usp=sharing>

✓ Link Eviden Baru

<https://drive.google.com/file/d/1WI833SG72EMPt7q-3V5GXdAEgMiGIBqt/view?usp=sharing>

g) Telah dilakukan REWARD berupa piagam bagi ASN kinerjanya baik dan PUNISHMENT bagi ASN yang kinerjanya sangat kurang. Telah Terlampir SK REWARD, Piagam REWARD bagi ASN dan PUNISHMENT bagi ASN yang jarang masuk berupa surat teguran tertulis.

✓ Link Eviden Lama

<https://drive.google.com/file/d/1ptC6BnJy7UFEnwY4DTM0qPszdyq9QKvj/view?usp=sharing>

✓ Link Eviden Baru

<https://drive.google.com/file/d/18X9bOzeHZ4A7lDmEYN5Df7VwNqtLfUOL/view?usp=sharing>

h) Telah dijabarkan keberhasilan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka untuk realisasi setiap tahunnya teus mengalami keberhasilan tingkat kepuasan terutama pada pelayanan PATEN dan juga Untuk Hasil Evaluasi LKjIP juga setiap tahunnya mengalami kenaikan dapat dilihat dari hasil Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Walantaka.

✓ Link Eviden Lama

<https://drive.google.com/file/d/1hUzBNCtqcrXEaFrOqdsHWLw4XGD38Z/view?usp=sharing>

✓ Link Eviden Baru

i) Telah dilakukan Evaluasi dan monitoring terhadap Indikator Kinerja Utama yang ada di kecamatan walantaka.

✓ Link Eviden Lama

<https://drive.google.com/file/d/1-hzx6BYgt-j4E0SmXlBvk9wO5MG-QR5s/view?usp=sharing>

✓ Link Eviden Baru

https://drive.google.com/file/d/1vTAyTHP4PjI3ialC9TwWUvR6p5crc_Zv/view?usp=s_haring

j) Telah dibuat Matrik IKU dari keberhasilan Program, Pencapaian Indikator Kinerja dan keberhasilan sampai dengan sub kegiatan. Telah terlampir Matrik IKU dari keberhasilan Program, Pencapaian Indikator Kinerja dan keberhasilan sampai dengan sub kegiatan.

✓ Link Eviden Lama

https://drive.google.com/file/d/1FzX21ZSli2xaQJtOtA1_IL8kJ7TMgOmP/view?usp=sharing

✓ Link Eviden Baru

<https://drive.google.com/file/d/1cJbrWd8zY5gSmTzJNfpX5CQv5pwJf6bC/view?usp=sharing>

k) Telah ada PERWAL NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG. Terlampir PERWAL NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI.

✓ Link Eviden Lama

https://drive.google.com/file/d/1yb2eTyZOe3hZKN_uui0Ku_XRGNVVerj/view?usp=sharing

✓ Link Eviden Baru

https://drive.google.com/file/d/1_yOgeTkeqVs3TjAInwSSjTljtMJPb6k/view?usp=sharing

l) Telah dibuat SURAT TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2022. Terlampir SURAT TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2022.

✓ Link Eviden Lama

<https://drive.google.com/file/d/1VzK7x85PODXbPcyESnEZ2J43INTos6ay/view?usp=sharing>

m) Telah dibuat Laporan Hasil MONEV BERUPA Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Terlampir Laporan Hasil MONEV BERUPA Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2022.

✓ Link Eviden Lama

https://drive.google.com/file/d/1SlsGvVT2xrzbc2_vZIfunkA3j_SLyK8W/view?usp=sharing

✓ Link Eviden Baru

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisikan tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi dan formulasi perhitungan indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pembuat keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih mendalam.

5.2 PROYEKSI MASA DEPAN

Proyeksi di masa depan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Walantaka diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan pelayanan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM Kecamatan Walantaka, memantapkan fungsi kelembagaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:


- 1) Dengan diberlakukannya peraturan daerah Kota Serang nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2022 perubahan peraturan daerah Kota Serang nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, diharapkan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan Walantaka beserta jajarannya di kelurahan secara arif dan cerdas agar pelaksanaan pelayanan dan pembangunan tidak menyimpang dari aturan yang ada.
- 2) Meningkatkan koordinasi antara institusi Kecamatan Walantaka dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme pelayanan serta pembangunan di Kecamatan Walantaka. Melalui program musyawarah pembangunan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses pelayanan dan pembangunan. Melibatkan setiap unsur masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan dan pembangunan.
- 5) Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD dan OPD Kecamatan dengan Kelurahan guna mendukung terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan sinergis.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan *standard operating procedure (SOP)* pada Kecamatan Walantaka sesuai dengan nomenklatur yang baru.
- 7) Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan. Dengan terus melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap SDM baik di kelurahan maupun kecamatan. Karena setiap pekerjaan pemerintahan telah berbasis e-government seperti system untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan dan barang milik daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Walantaka kota Serang di susun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Walikota Serang melalui cq. Bagian Organisasi.

Sebagai akhir kata, kami beserta aparatur Kecamatan Walantaka mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini dapat memenuhi akuntabilitas kami kepada Stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Walantaka, 27 Januari 2024

CAMAT WALANTAKA

MUSLIM SHOLEH, S.Pd., M.Si
NIP. 19800410 200801 1 010



LKjIP 2023
KECAMATAN WALANTAKA